



Kinerja BPOM

Dalam Angka

Triwulan III Tahun 2024



**KINERJA BPOM
DALAM ANGKA**



TRIWULAN III TAHUN 2024

SAMBUTAN KEPALA BPOM RI



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat Rahmad dan RidhoNya sehingga BPOM dapat terus hadir melayani dan melindungi masyarakat melalui jaminan Obat dan Makanan yang aman, berkualitas/bermanfaat, dan bermutu. Kinerja BPOM sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 dituangkan dalam “Kinerja BPOM Dalam Angka”. Buku ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban BPOM dalam pelaksanaan anggaran pemerintah dan juga sumber informasi tentang hasil - hasil pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam buku ini disampaikan hasil pengawasan Obat dan Makanan baik yang dilakukan BPOM sendiri maupun bermitra dengan pemangku kepentingan yang mencakup standardisasi, evaluasi *pre-market*, hingga pengawasan *post-market* yang disertai upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2024, beberapa kinerja yang telah dicapai BPOM di antaranya adalah persetujuan 155.148 NIE, pemeriksaan terhadap 29.633 sarana produksi dan sarana distribusi, pengujian 56.876 sampel, 231 perkara, dan 407 kegiatan pelaksanaan KIE.

Di tengah dinamika global dan tantangan pengawasan yang semakin kompleks, termasuk isu-isu krusial seperti maraknya peredaran obat ilegal dan pangan yang tidak aman, BPOM semakin memperkuat upaya pengawasan dan penegakan hukum. Kasus-kasus besar seperti peredaran obat-obatan yang mengandung zat berbahaya dan skandal impor pangan ilegal menunjukkan betapa pentingnya peran BPOM dalam melindungi kesehatan masyarakat. Dengan inovasi teknologi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, BPOM berharap dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien. BPOM juga aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat dan mendukung pelaku usaha, termasuk UMKM, agar dapat menghasilkan produk yang aman dan berdaya saing.

Terima kasih kepada seluruh jajaran BPOM serta mitra kerja atas kinerja yang dicapai sampai dengan Triwulan III Tahun 2024. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi semua mitra kerja BPOM sebagai bahan evaluasi bagi pelaksanaan kegiatan agar terus berupaya bersama meningkatkan kinerja pada masa mendatang dalam upaya melayani dan melindungi masyarakat.

Jakarta, 12 Desember 2024
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan,



dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., MD., Ph.D.

Daftar Isi

SAMBUTAN BPOM RI	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
HIGHLIGHT	1
BAB 1 Hasil Pengawasan Keamanan, Khasiat, dan Mutu Produk Obat dan Makanan	5
BAB 2 Penindakan di Bidang Obat dan Makanan	11
BAB 3 Penyusunan Peraturan/Standar/Pedoman	15
BAB 4 Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	19
BAB 5 Pengembangan dan Pengujian Obat dan Makanan	21
BAB 6 Optimalisasi Pemberdayaan Mitra Kerja dan Masyarakat	23
BAB 7 Digitalisasi Pelayanan Publik	33
BAB 8 Perkuatan Peraturan Perundang-Undangan Pengawasan Obat dan Makanan	39
BAB 9 Penguatan dan Penataan Organisasi dan Tata Laksana serta Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	43
BAB 10 Kerjasama Internasional	47
BAB 11 Sumber Daya Manusia	51
BAB 12 Realisasi Anggaran Sampai dengan September 2024	57
BAB 13 Pemantauan Capaian Rencana Kerja Pemerintah (RKP) BPOM	59
Penutup	59
Lampiran	60

Daftar Gambar

Gambar 1.	Profil Registrasi Obat dan Makanan	5
Gambar 2.	Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan Sebelum Beredar/Dipublikasikan	5
Gambar 3.	Profil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan	6
Gambar 4.	Profil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan.....	6
Gambar 5.	Profil Sertifikasi Obat dan Makanan.....	9
Gambar 6.	Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan.....	9
Gambar 7.	Profil Pengawasan Label Obat dan Makanan.....	10
Gambar 8.	Peta Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan.....	11
Gambar 9.	Hasil Operasi Intelijen s.d Triwulan III Tahun 2024	12
Gambar 10.	Hasil Patroli Siber Obat dan Makanan s.d Triwulan III Tahun 2024.....	13
Gambar 11.	Grafik Kemajuan Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan Seluruh Indonesia s.d. Triwulan III Tahun 2024	14
Gambar 12.	Jumlah Publikasi Siaran Pers/Penjelasan/Klarifikasi Badan POM s.d. Triwulan III Tahun 2024.....	23
Gambar 13.	Data Kegiatan Pelayanan Informasi kepada Media s.d. Triwulan III tahun 2024.....	23
Gambar 14.	Tren Tonasi Pemberitaan Terkait Isu Obat dan Makanan s.d Triwulan III Tahun 2024	24
Gambar 16.	Total Unggahan Media Sosial Badan POM Berdasarkan Platform s.d Triwulan III Tahun 2024	25
Gambar 15.	Sebaran Pemberitaan Isu Obat dan Makanan di Media s.d Triwulan III Tahun 2024.....	25
Gambar 17.	Pertumbuhan Audiens Berdasarkan Platform s.d Triwulan III Tahun 2024	26
Gambar 18.	Engagement Per Platform s.dTriwulan III Tahun 2024	27
Gambar 19.	Top Engagement Content terkait Badan POM pada Platform Facebook, X, Instagram dan Youtube s.d Triwulan III Tahun 2024	27
Gambar 21.	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan s.d Triwulan III Tahun 2024	28
Gambar 20.	Majalah Pengawasan Obat dan Makanan (MaPOM) Vol.6/No.1/2024	28
Gambar 22.	Statistik Jumlah Permintaan Informasi Publik pada Triwulan III Tahun 2024.....	29
Gambar 23.	Profil Pengguna Layanan Informasi dan Pengaduan Badan POM Berdasarkan Profesi	30
Gambar 24.	Profil Media Permintaan Layanan Informasi dan Pengaduan Badan POM	30
Gambar 25.	Profil Layanan Informasi dan Pengaduan yang Diberikan oleh Badan POM Berdasarkan Komoditi	31
Gambar 26.	Topik Layanan Infomasi dan Pengaduan yang Diberikan atau Ditanyakan kepada Badan POM	31
Gambar 27.	Fitur BPOM Mobile	33
Gambar 28.	Aktivitas BPOM Mobile Tahun 2018 s.d Triwulan III Tahun 2024.....	34
Gambar 29.	Integrasi SPIPT dengan Aplikasi SMARTPOM	36
Gambar 30.	Tampilan Menu Login pada Aplikasi SMART POM	37
Gambar 31.	Dashboard Data Pengajuan pada Layanan Helpdesk Pusdatin	38
Gambar 32.	Layanan Advokasi Hukum yang Diberikan oleh Badan POM s.d. Triwulan III Tahun 2024.....	41
Gambar 33.	Realisasi Anggaran s.d September 2024	57

Daftar Tabel

Tabel 1. Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan (Target).....	7
Tabel 2. Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan (Random)	8
Tabel 3. Profil Laporan Efek Samping.....	10
Tabel 4. Hasil Evaluasi Pemanfaatan Aplikasi LSP BPOM s.d. Triwulan III Tahun 2024	51
Tabel 5. Hasil Monitoring Pemanfaatan Aplikasi PENKOMTEK s.d. Triwulan III Tahun 2024	52
Tabel 6. Hasil Monitoring Pemanfaatan Aplikasi SIPENATEMANKU s.d. Triwulan III Tahun 2024.....	52
Tabel 7. Hasil Monitoring Pemanfaatan Aplikasi CMC s.d. Triwulan III Tahun 2024	54
Tabel 8. Hasil Monitoring Pemanfaatan Aplikasi IDEAS s.d. Triwulan III Tahun 2024	55
Tabel 9. Hasil Monitoring Pengembangan Kompetensi pada Aplikasi SIASN s.d. Triwulan III Tahun 2024.....	55

Highlight

Dukung Program JKN, BPOM Serukan Obat Generik Berkualitas



Surabaya, Kamis (11/7/2024). Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPOM RI L. Rizka Andalusia mengajak seluruh industri farmasi mematuhi standar Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), termasuk penggunaan bahan baku berstandar *pharmagrade* sesuai standar Farmakope Indonesia Edisi VI. “Kami mendorong agar industri farmasi meningkatkan kapasitas dalam mematuhi CPOB serta melakukan perbaikan berkelanjutan untuk meminimalisir temuan obat tidak memenuhi syarat,” ajak Rizka dalam Dialog Harmonis Lintas Sektoral dengan tema Sinergisme Stakeholders Mewujudkan Obat Generik Berkualitas.

Dalam forum ini, BPOM menegaskan komitmennya untuk menerapkan *Good Submission Practices* (GRP) dan *Good Review Practice* (GRevP) guna meningkatkan efisiensi proses registrasi obat serta mencegah obat substandar. BPOM juga menyatakan kesiapan mendampingi industri farmasi dalam memenuhi ketentuan *Good Submission Practice* sesuai *ASEAN Common Technical Dossier* (ACTD) dan *ASEAN Common Technical Requirement* (ACTR) untuk memperlancar proses registrasi. Selama forum dialog selama 4 hari ini, BPOM juga menggelar *desk* konsultasi registrasi obat, serta *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) dan pra-sertifikasi CPOB. Target penyelesaian berkas pada *desk* ini sebanyak 321 nomor pengajuan (aju), dengan rincian 15 aju pra-registrasi obat generik, 80 aju registrasi baru obat generik, 220 aju registrasi variasi dan *renewal* obat generik, serta 6 aju laporan uji bioekivalensi (BE).

Kolaborasi BPOM dan Kemenparekraf Hadirkan Wellness Festival 2024



Jakarta, Jumat (2/8/2024). BPOM bergandengan tangan dengan Kemenparekraf menyelenggarakan *Wellness Festival* (WELLFEST) 2024 di Central Park Mall. Festival mengenai *Natural Beauty and Wellness* ini didukung oleh berbagai pelaku usaha yang menghadirkan produk-produk kecantikan dan kebugaran seperti obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang aman dan bermutu. Masyarakat dapat berkunjung secara gratis ke WELLFEST 2024 yang diadakan pada 2–4 Agustus 2024. Pengunjung juga dapat melihat langsung produk *wellness* pada tidak kurang dari 80 booth pameran yang memeriahkan festival ini.

Pembukaan WELLFEST 2024 berlangsung pada dan dihadiri langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPOM RI L. Rizka Andalusia dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Sandiaga Salahuddin Uno. Kemeriahan pembukaan diawali dengan penampilan dari Diva Indonesia Krisdayanti yang membangkitkan semangat. Krisdayanti, yang juga merupakan mitra BPOM sebagai anggota Komisi IX DPR RI, turut mendukung kegiatan WELLFEST 2024 dengan memperdengarkan suara emasnya dan menarik perhatian para pengunjung mal ke kemeriahan pembukaan acara siang hari itu. Rangkaian kegiatan WELLFEST 2024 diisi dengan berbagai acara seperti pameran produk, talkshow dan seminar, desk konsultasi, panggung hiburan, hingga forum temu bisnis. Dengan adanya temu bisnis ini, industri *wellness* dapat semakin bertumbuh pesat dan berdaya saing global.

BPOM Tegas Tumpas Produk Kosmetik Impor Ilegal



Jakarta, Senin (30/9/2024). BPOM menggelar konferensi pers bersama Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor (Kosmetik Impor Ilegal) di Aula Bhinneka Tunggal Ika BPOM. Konferensi pers tersebut memaparkan hasil pengawasan antar-kementerian/lembaga yang berhasil mengamankan produk kosmetik impor ilegal senilai lebih dari Rp11,4 miliar. Produk tersebut merupakan hasil operasi penindakan dan intensifikasi pengawasan di berbagai wilayah di Indonesia selama periode Juni hingga September 2024.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan hadir secara langsung pada konferensi pers hari ini. Selain itu, dihadiri pula oleh lintas sektor lainnya yang merupakan anggota Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor, yaitu Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan Rusmin Amin; Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan Moga Simatupang; Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional Bara Krishna Hasibuan; Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Rizal; Staf Khusus Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Rizal Irawan; serta perwakilan-perwakilan dari Badan Keamanan Laut, Kementerian Perindustrian; Kejaksaan Agung Republik Indonesia; Kepolisian Republik Indonesia; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Perwakilan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM di seluruh Indonesia turut mengikuti kegiatan, baik secara luring maupun daring.



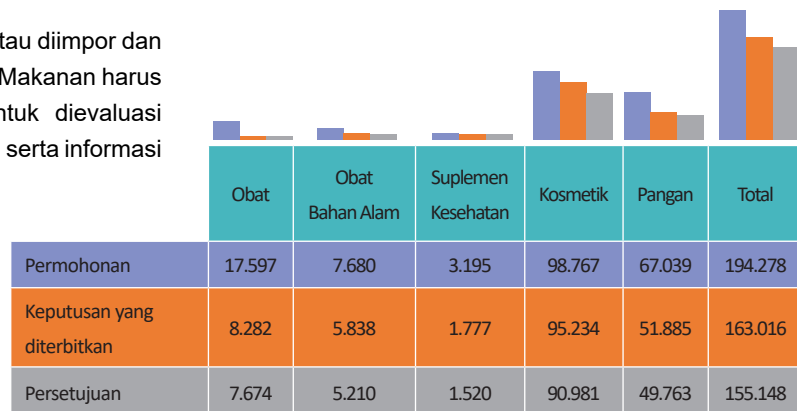
BAB 1

Hasil Pengawasan Keamanan, Khasiat, dan Mutu Produk Obat dan Makanan

Pengawasan *Pre-market*

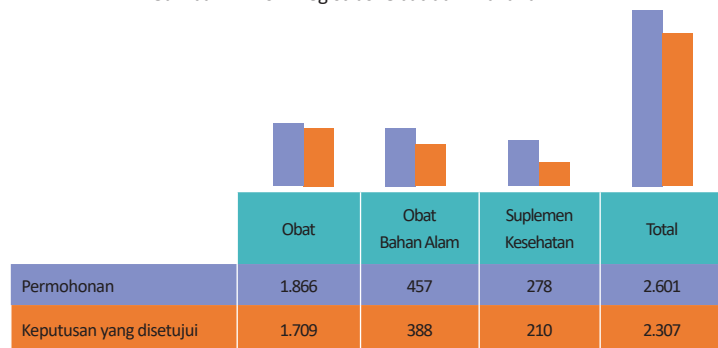
Sebelum Obat dan Makanan diproduksi atau diimpor dan diedarkan di wilayah Indonesia, Obat dan Makanan harus melalui registrasi oleh Badan POM untuk dievaluasi terkait aspek keamanan, khasiat dan mutu serta informasi melalui penandaan/label.

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2024, telah diterbitkan 163.016 keputusan dan 155.148 persetujuan izin edar dari 194.278 berkas permohonan registrasi Obat dan Makanan



Gambar 1. Profil Registrasi Obat dan Makanan

Untuk melindungi masyarakat dari klaim yang menyesatkan, Badan POM telah melakukan evaluasi rancangan iklan terhadap kebenaran klaim iklan khusus obat bebas, obat bebas terbatas, obat tradisional dan suplemen kesehatan yang telah mendapatkan izin edar sebelum ditayangkan atau diedarkan. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2024, dari 2.601 permohonan persetujuan rancangan iklan, telah disetujui 2.307 (88,70%) iklan.



Gambar 2. Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan Sebelum Beredar/Dipublikasikan

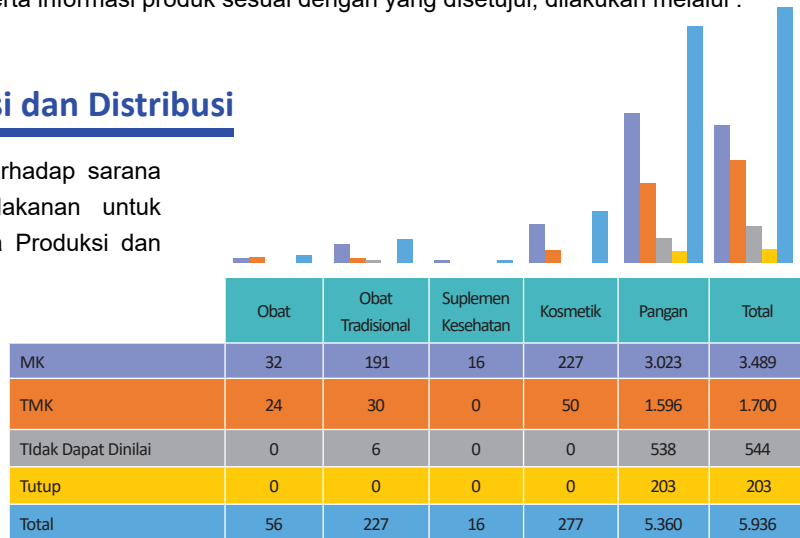
Pengawasan *Post-market*

Pengawasan *post-market* dilakukan setelah produk beredar untuk memastikan bahwa Obat dan Makanan yang beredar aman, berkhasiat dan bermutu serta informasi produk sesuai dengan yang disetujui, dilakukan melalui :

Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi

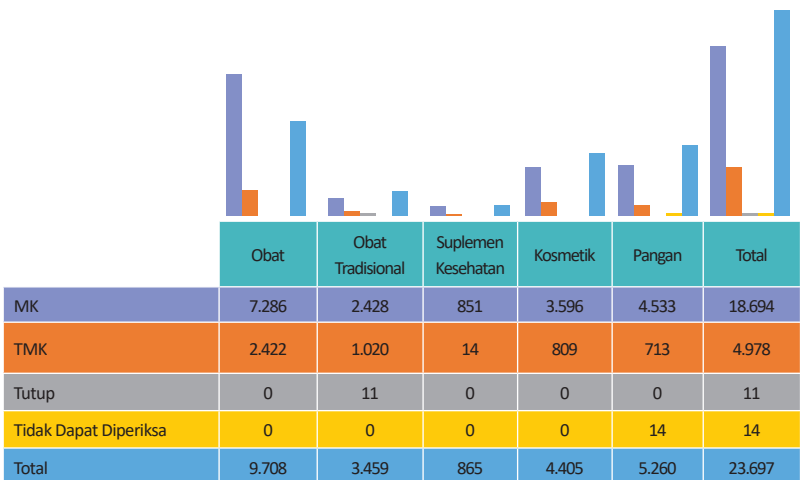
Badan POM melakukan pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan untuk menjamin kepatuhan implementasi Cara Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan Yang Baik.

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 telah diperiksa sebanyak 5.936 sarana produksi Obat dan Makanan dengan 1.700 (28,63%) sarana adalah TMK.



Gambar 3. Profil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 telah diperiksa sebanyak 23.697 sarana distribusi Obat dan Makanan dengan 4.978 (21,00%) sarana adalah TMK.



Gambar 4. Profil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan

Keterangan
 TMK : Tidak Memenuhi Ketentuan
 MK : Memenuhi Ketentuan

Sampling dan Pengujian Laboratorium

a. Targeted

Tabel 1. Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan (Target)

Komoditi	Metode Sampling	Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji		Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar
			TIE/ Illegal/ Palsu	Kedaluarsa	rusak				MS	TMS*			
		(a)	(b)			(c)	(d=a-b)	(e=f+g)	(f)	(g)	(h=b+g)	(i=d-e)	(j=b+e)
Obat	Tageted	2.916	2	0	0	33	2.914	2.161	2095	66	68	753	2.163
Obat Tradisional	Tageted	3.200	1	0	5	124	3.194	2.610	2340	270	276	584	2.616
Kuasi	Tageted	230	0	0	0	4	230	174	168	6	6	56	174
Suplemen Kesehatan	Tageted	889	0	0	3	6	886	730	695	35	38	156	733
Kosmetik	Tageted	6.551	10	0	2	390	6.539	5.248	4.772	476	488	1.291	5.260
Rokok	Tageted	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pangan	Tageted	4.140	0	0	2	384	4.138	3.070	2.688	382	384	1.068	3.072

Sumber: Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK) BB/BPOM Triwulan III 2024

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2024, dari 17.926 sampel *targeted* yang disampling terdapat 14.018 sampel yang selesai diperiksa dan diuji laboratorium. Dari seluruh sampel yang sudah selesai diperiksa dan diuji laboratorium, terdapat 1.235 (8,81%) sampel tidak memenuhi syarat.

Keterangan:

MS = Memenuhi Syarat

TMS = Tidak Memenuhi Syarat

TIE = Tanpa izin Edar

b. Random
Tabel 2. Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan (Random)

Komoditi	Metode Sampling	Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji		Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar
			TIE/ Ilegal/ Palsu	Kedaluarsa	rusak				MS	TMS*			
		(a)	(b)			(c)	(d=a-b)	(e=f+g)	(f)	(g)	(h=b+g)	(i=d-e)	(j=b+e)
Obat	Random	12.149	0	0	4	191	12.145	9.606	9.387	219	223	2.539	9.610
Obat Tradisional	Random	7.946	0	0	6	305	7.940	6.664	6.033	631	637	1.276	6.670
Kuasi	Random	554	0	0	0	3	554	430	424	6	6	124	430
Suplemen Kesehatan	Random	2.139	0	0	4	31	2.135	1.776	1.634	142	146	359	1.780
Kosmetik	Random	15.494	0	0	6	720	15.488	12.438	11.683	755	761	3.050	12.444
Pangan	Random	16.107	0	0	6	529	16.101	11.969	10.872	1.097	1.103	4.132	11.975

Sumber: Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK) BB/BPOM Triwulan III 2024

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2024, dari 54.389 sampel *random* yang disampling terdapat 42.909 sampel yang selesai diperiksa dan diuji laboratorium. Dari seluruh sampel yang sudah selesai diperiksa dan diuji laboratorium, terdapat 2.850 (6,64%) sampel tidak memenuhi syarat.

Keterangan:

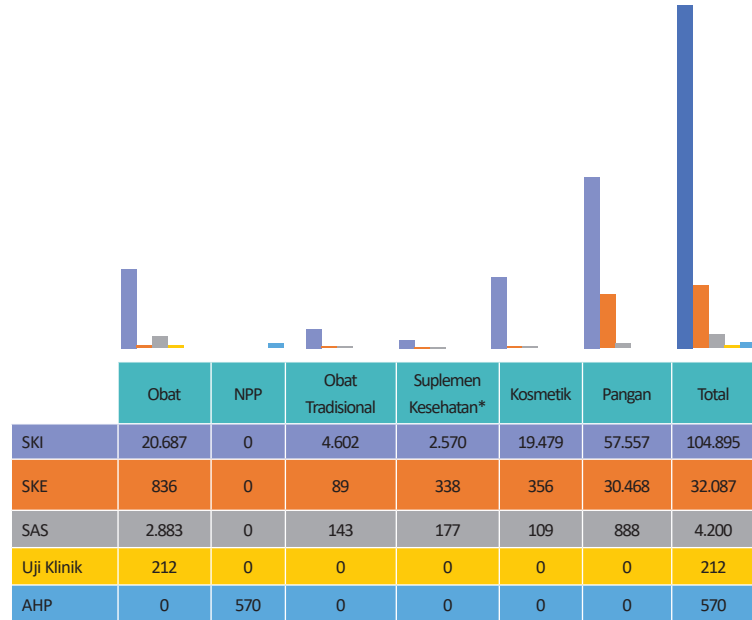
MS = Memenuhi Syarat

TMS = Tidak Memenuhi Syarat

TIE = Tanpa izin Edar

Sertifikasi

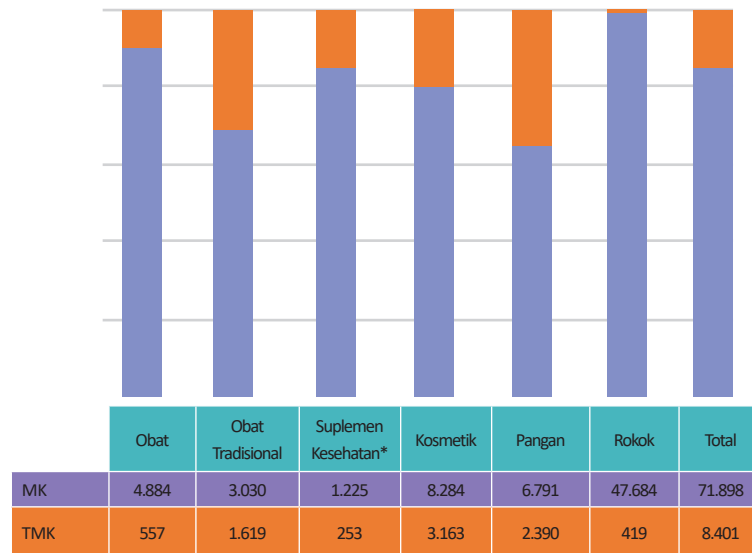
Dalam rangka mendorong ekspor dan impor pengawasan produk dan bahan baku yang masuk ke wilayah Indonesia, Badan POM mengeluarkan Surat Keterangan Impor (SKI) dan Surat Keterangan Ekspor (SKE), SAS (*Special Access Scheme*), Uji Klinik, dan AHP (Analisa Hasil Pengawasan) Obat dan Makanan. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 telah diterbitkan 104.895 SKI, 32.087 SKE, 4.200 SAS, 212 Uji Klinik, dan 570 AHP Obat dan Makanan.



Gambar 5. Profil Sertifikasi Obat dan Makanan

Pengawasan Iklan

Untuk mencegah masyarakat mendapatkan informasi yang salah dan menyesatkan tentang produk Obat dan Makanan, Badan POM melakukan pengawasan iklan produk di beberapa jenis media antara lain media cetak, televisi, radio, luar ruang dan *leaflet*/brosur. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2024, dari 80.299 iklan Obat dan Makanan yang diawasi, 8.401 (10,46%) iklan tidak memenuhi ketentuan.



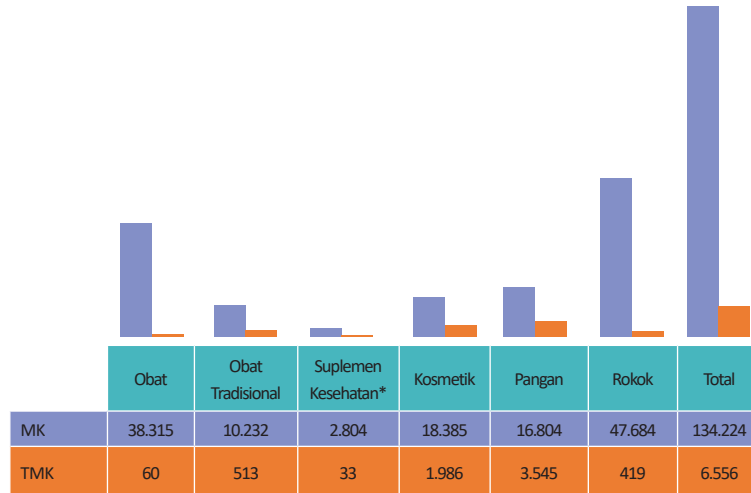
Gambar 6. Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan

* Termasuk Kuasi

Pengawasan Label

Badan POM juga mengawasi kesesuaian label produk Obat dan Makanan yang beredar dengan yang telah disetujui Badan POM, agar tidak memberikan informasi yang salah dan menyesatkan kepada masyarakat. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2024, dari 140.780 label Obat dan Makanan yang diawasi, sebanyak 6.556 atau sekitar 4,66% label tidak memenuhi ketentuan.

* Termasuk Kuasi



Gambar 7. Profil Pengawasan Label Obat dan Makanan

Monitoring Efek Samping Obat (MESO), Monitoring Efek Samping Obat Tradisional (MESOT), Monitoring Efek Samping Suplemen Kesehatan (MESSK), Monitoring Efek Samping Kosmetik (MESKOS)

Tabel 3. Profil Laporan Efek Samping

	Jumlah Laporan	Jumlah laporan Tindakanlanjut	%
Obat	9.792	7857	80,24
Obat Tradisional	21	21	100,00
Suplemen Kesehatan	36	36	100,00
Kosmetik	703	687	97,72



Penggunaan Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik oleh berbagai kalangan masyarakat, maka resiko timbulnya efek yang tidak diinginkan tetap ada. Oleh karena itu, Badan POM melakukan evaluasi aspek keamanan produk yang beredar terhadap seluruh laporan efek samping yang diterima dari masyarakat dan/atau tenaga kesehatan, dengan membentuk Tim/Panitia:

- MESO, MESOT, dan MESSK terdiri dari ahli farmakologi/farmakologi klinik dan beberapa tenaga ahli lainnya.
- MESKOS terdiri dari dokter spesialis kulit.

BAB 2

Penindakan di Bidang Obat dan Makanan

1. Peta Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan

Dalam melaksanakan strategi pencegahan kejahatan Obat dan Makanan, diperlukan basis data yang solid untuk kemudian dianalisis dan menjadi dasar dalam menentukan kebijakan. Untuk membangun basis data tersebut, Badan POM menyusun aplikasi peta kerawanan kejahatan, yaitu peta yang menggambarkan kondisi terkini kerawanan kejahatan Obat dan Makanan yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia.

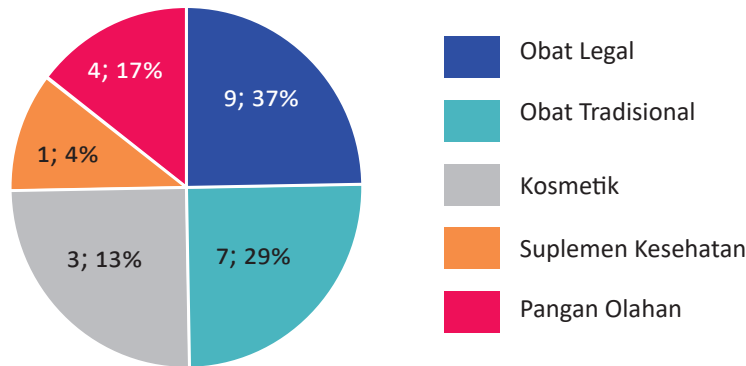


Gambar 8. Peta Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan

Sampai dengan triwulan III tahun 2024, data kasus yang sudah diverifikasi untuk menghasilkan data kerawanan kejahatan yang aktual sebanyak 3.404 kasus yang terdiri dari 1.247 kasus terkait obat, 658 kasus terkait obat tradisional, 139 kasus suplemen kesehatan, 1.094 kasus terkait kosmetik dan 266 kasus terkait komoditi pangan.

2. Hasil Kegiatan dan Operasi Intelijen

Peran Badan POM dalam melakukan pengawasan Obat dan Makanan sangat strategis seiring dengan masih banyaknya temuan terkait Obat dan Makanan ilegal baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi ketahanan dan kesehatan masyarakat Indonesia. Salah satu upaya Badan POM untuk meminimalisir hal tersebut adalah dengan melakukan kegiatan/operasi intelijen guna meningkatkan pengawasan peredaran Obat dan Makanan baik pada tahap *premarket* maupun *postmarket*. Kegiatan/operasi intelijen telah dilaksanakan di berbagai daerah dengan berbagai kasus komoditi di antaranya kasus obat, NAPPZA, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan pangan olahan baik yang berujung ditindaklanjuti dengan sanksi administrasi maupun *projusticia*.

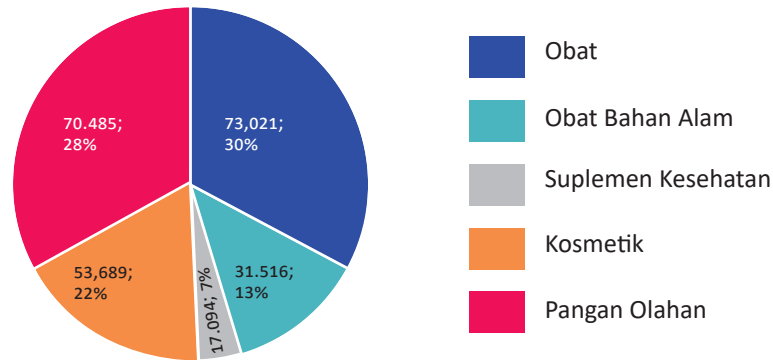


Gambar 9. Hasil Operasi Intelijen s.d Triwulan III Tahun 2024

Sampai dengan triwulan III tahun 2024, telah disusun 177 laporan informasi dari pelaksanaan kegiatan intelijen dan 20 laporan intelijen dari pelaksanaan operasi intelijen. Dari seluruh rangkaian kegiatan dan operasi intelijen tersebut telah dihasilkan 24 rekomendasi intelijen dengan 9 rekomendasi terkait kasus peredaran obat ilegal, 7 rekomendasi terkait kasus obat tradisional ilegal, 3 rekomendasi kasus kosmetik ilegal, 1 rekomendasi kasus suplemen kesehatan serta 4 rekomendasi terkait kasus pangan olahan yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh unit penerima rekomendasi.

3. Hasil Patroli Siber

Dalam rangka meningkatkan pengawasan peredaran Obat dan Makanan di media daring, Badan POM telah melakukan kegiatan patroli siber untuk melakukan pemantauan dan pelaporan terhadap penjualan produk Obat dan Makanan ilegal dan/atau tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.



Gambar 10. Hasil Patroli Siber Obat dan Makanan s.d Triwulan III Tahun 2024

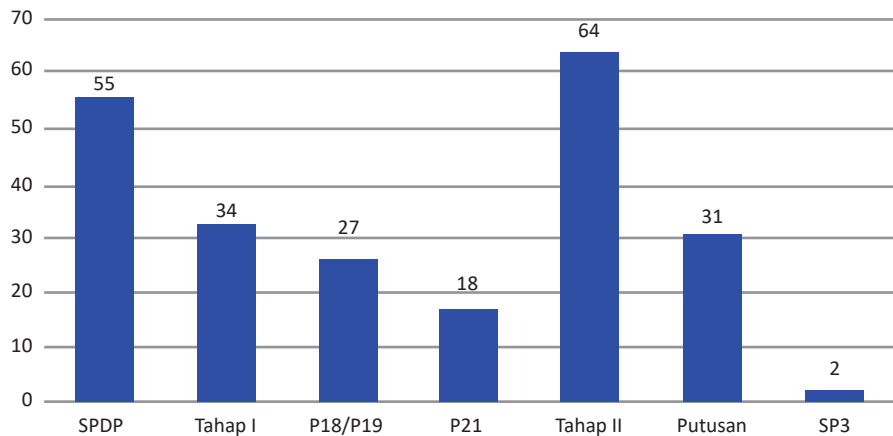
Berdasarkan data hasil patroli siber Obat dan Makanan sampai dengan triwulan III tahun 2024, ditemukan 245.805 *link* yang teridentifikasi menjual Obat dan Makanan ilegal dan/atau tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.



4. Hasil Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan

Dalam rangka memberantas dan menertibkan peredaran produk Obat dan Makanan ilegal, Badan POM secara terus menerus melakukan investigasi awal dan penyidikan kasus tindak pidana di bidang Obat dan Makanan. Upaya ini dilakukan secara mandiri maupun bersinergi dengan instansi penegak hukum lainnya dalam kerangka Operasi Gabungan Nasional dan Operasi Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal.

Sampai dengan triwulan III tahun 2024, PPNS Badan POM telah menindaklanjuti 231 perkara. Sebanyak 55 perkara masih dalam tahap SPDP, 34 perkara pada tahap I, 27 perkara pada tahap P18/19, 18 perkara pada tahap P21, 64 perkara pada tahap II, 31 perkara yang mendapatkan putusan pengadilan, dan 2 perkara pada tahap SP3.



Gambar 11. Grafik Kemajuan Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan Seluruh Indonesia s.d. Triwulan III Tahun 2024



BAB 3

Penyusunan Peraturan/Standar/Pedoman

Dalam rangka mengawal mutu Obat dan Makanan, telah disusun peraturan/standar/pedoman di bidang Obat dan Makanan.

Obat

Pada tahun 2024, terdapat 17 peraturan/standar/pedoman yang disusun oleh Badan POM. Daftar 17 peraturan/standar/pedoman obat beserta progres penyusunan sampai dengan triwulan II sebagai berikut:

1. Revisi Peraturan Badan POM No. 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Obat Berbasis Sel Manusia (85%).
2. Revisi Peraturan Badan POM No. 16 Tahun 2015 tentang Obat Pengembangan Baru (45%).
3. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Perubahan atas Peraturan Badan POM No. 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Sertifikasi Pelulusan Bets/Lot Vaksin (100%).
4. Revisi Peraturan Badan POM tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik (85%).
5. Revisi Peraturan Badan POM No. 30 Tahun 2022 tentang Pemasukan Obat dan Bahan Obat Melalui Mekanisme Jalur Khusus (*Special Access Scheme*) (100%).
6. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Perubahan Atas Peraturan Badan POM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik (substansi revisi Aneks 1 Pembuatan Produk Steril) (95%).
7. Revisi Peraturan Kepala Badan POM No. 10 Tahun 2017 tentang Penerapan Pedoman Cara Pembuatan Obat Yang Baik di Unit Transfusi Darah dan Pusat Plasmaferesis (95%).
8. Peraturan Badan POM tentang Pedoman Pengkajian Keamanan dan/atau Mutu Obat dan Bahan Obat (85%).
9. Peraturan Badan POM tentang Pedoman Verifikasi Metode Analisis Obat dan Bahan Obat (75%).
10. Standard Mutu Obat Baru (100%).
11. Rancangan Keputusan Kepala Badan POM Pusat Farmakovigilans/Monitoring Efek Samping Obat Nasional (100%).
12. Pedoman atau Petunjuk Teknis Rekognisi Laboratorium Penyedia Jasa Pengujian Obat dan Bahan Obat (35%).
13. Rancangan Keputusan Badan POM tentang Standar Informasi Obat (100%).
14. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Tata Cara Penilaian Pemenuhan Cara Pembuatan Obat yang Baik di Fasilitas Produksi dan Cara Distribusi Obat yang Baik di Fasilitas Distribusi (75%).

15. Revisi Peraturan Kepala Badan POM tentang Pengawasan Produk Tembakau yang Beredar, Pencantuman Peringatan Kesehatan dalam Iklan dan Kemasan Produk Tembakau, dan Promosi (45%).
16. Revisi Keputusan Kepala Badan POM No. 65 Tahun 2022 tentang Daftar Obat Generik Tertentu Wajib Uji Bioekivalensi (100%).
17. Revisi Keputusan Kepala Badan POM No. 148 Tahun 2023 tentang Pedoman Cara Regulatori Obat yang Baik dan Penyusunan *Tools* Monitoring serta Evaluasi Implementasinya (45%).
15. Revisi Peraturan Kepala Badan POM tentang Pengawasan Produk Tembakau yang Beredar, Pencantuman Peringatan Kesehatan dalam Iklan dan Kemasan Produk Tembakau, dan Promosi (15%).
16. Revisi Keputusan Kepala Badan POM No. 65 Tahun 2022 tentang Daftar Obat Generik Tertentu Wajib Uji Bioekivalensi (55%).
17. Revisi Keputusan Kepala Badan POM No. 148 Tahun 2023 tentang Pedoman Cara Regulatori Obat yang Baik dan Penyusunan *Tools* Monitoring serta Evaluasi Implementasinya (45%).

Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Terdapat 10 peraturan/standar/pedoman obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang disusun oleh Badan POM pada tahun 2024. Daftar 10 peraturan/standar/pedoman beserta progres penyusunan sampai dengan triwulan II sebagai berikut:

1. Revisi Peraturan Badan POM No. 14 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (80%).
2. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Penerapan Program Manajemen Risiko di Fasilitas Industri Obat Bahan Alam (60%).
3. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Kajian Risiko terhadap Bahan Tambahan yang Digunakan dalam Sediaan Tertentu Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (80%).
4. Revisi Peraturan Badan POM No. 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika (90%).
5. Rancangan Perubahan Peraturan Badan POM No. 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika (60%).
6. Rancangan Perubahan Peraturan Badan POM No. 33 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetika Yang Baik (60%).
7. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Pedoman Uji Klinik (80%).
8. Revisi Peraturan Badan POM No. 16 Tahun 2019 tentang Pengawasan Suplemen Kesehatan (60%).
9. Revisi Peraturan Badan POM No. 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetika (60%).

10. Rancangan Perubahan Peraturan Badan POM No. 32 Tahun 2022 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Suplemen Kesehatan (100%).

Sampai dengan triwulan III tahun 2024 telah diselesaikan 137 kajian dan seluruhnya diselesaikan tepat waktu (tidak lebih dari 85 hari kerja). Penyusunan kajian dilakukan berdasarkan permintaan dari *stakeholder*.

Pangan

Terdapat 11 peraturan/standar/pedoman pangan olahan yang disusun oleh Badan POM pada tahun 2024. Daftar 11 peraturan/standar/pedoman beserta progres penyusunan sampai dengan triwulan III sebagai berikut:

1. Kebijakan dalam rangka Antisipasi *Emerging Issue* melalui Penelaahan Regulasi Cemaran Pangan Olahan di Berbagai Negara (70%).
2. Kajian terhadap Penjualan Pangan Curah melalui Depot (70%).
3. Pedoman Penetapan Masa Simpan untuk Pangan Olahan yang Diproduksi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil (70%).
4. Pedoman Implementasi Peraturan Badan POM terkait Kemasan Pangan (60%).
5. Amandemen Peraturan Badan POM No. 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan (83,33%).
6. Revisi Peraturan Badan POM No. 26 Tahun 2021 tentang Informasi Nilai Gizi (100%).
7. Revisi Peraturan Badan POM No. 24 Tahun 2020 tentang Pangan Keperluan Gizi Khusus (76,92%).
8. Amandemen Peraturan Badan POM No. 27 Tahun 2021 tentang Pangan Olahan Berasam Rendah Dikemas Hermetis (95%).
9. Amandemen Peraturan Badan POM No. 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan (78%).
10. Revisi Peraturan Badan POM No. 31 Tahun 2018 Label Pangan Olahan (60%).
11. Finalisasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan (30%).

Badan POM juga menyusun rekomendasi kebijakan terkait pangan olahan. Sampai dengan triwulan III tahun 2024 telah diselesaikan 167 rekomendasi kebijakan dan seluruhnya diselesaikan tepat waktu.

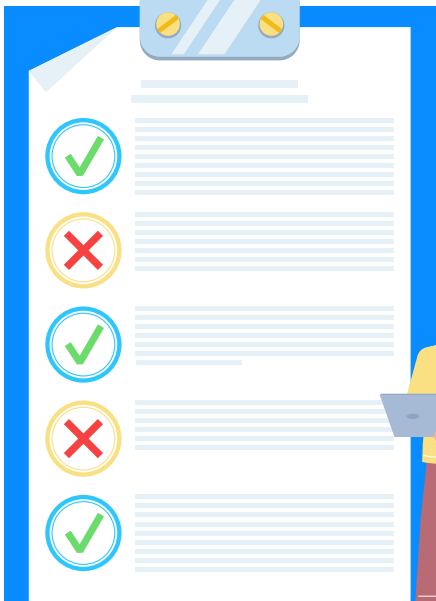


BAB 4

Analisis Kebijakan Obat dan Makanan

Analisis kebijakan Obat dan Makanan dilakukan untuk mendukung pengambilan keputusan sekaligus dasar penyusunan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan. Data hasil riset dan kajian yang berupa informasi dan rekomendasi dimanfaatkan untuk mengetahui dan meningkatkan efektifitas implementasi kebijakan pengawasan Obat dan Makanan. Pada tahun 2024 terdapat 7 topik riset dan kajian yang dilaksanakan oleh Badan POM. Daftar riset dan kajian beserta progres penyusunan sampai dengan triwulan III sebagai berikut:

1. Analisis Data Kasus Keracunan Obat dan Makanan (82%).
2. Analisis Risiko Keamanan Pangan Indonesia *Risk Assessment* (98%).
3. Pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu dan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2024 (79%).
4. Pengukuran Indeks Kepuasan Pelaku Usaha (IKEPU) terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Badan POM Tahun 2024 (72%).
5. Pengukuran Indeks Kepatuhan (*Compliance Index*) Pelaku Usaha di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2024 (75%).
6. Analisis Efektivitas Implementasi Konsep Regionalisasi Laboratorium Badan POM (81%).
7. Evaluasi Implementasi Pedoman Sampling dan Pengujian Tahun 2024 dan Penyusunan Pedoman Sampling Obat dan Makanan Tahun 2025 (75%).



BAB 5

Pengembangan dan Pengujian Obat dan Makanan

1. Metode Analisis yang Dikembangkan

Badan POM terus mengembangkan metode analisis Obat dan Makanan agar dapat melakukan pengujian keamanan dan mutu Obat dan Makanan yang beredar sesuai dengan persyaratan terkini. Pengembangan metode analisis dilakukan untuk komoditi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, produk biologi, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan olahan, air, mikrobiologi dan biologi molekuler. Hasil pengujian digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan bahkan penindakan terkait pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Sampai dengan triwulan III tahun 2024 telah dikembangkan 135 metode analisis.

2. Baku Pembanding yang Dikembangkan

Pengembangan baku pembanding dapat dimanfaatkan oleh Balai Besar/Balai POM untuk memperkuat pengawasan Obat dan Makanan melalui pengujian laboratorium. Sampai dengan triwulan III tahun 2024 telah dikembangkan 79 baku pembanding.

3. Sampel yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu

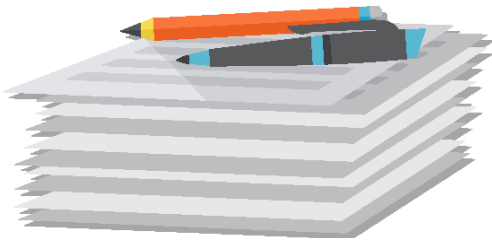
Badan POM selalu berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada *stakeholder* melalui pelayanan pengujian Obat dan Makanan termasuk sampel pengujian produk biologi dan sampel *lot release* vaksin dalam rangka pengawasan keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. Sampai dengan triwulan III tahun 2024, terdapat 889 sampel yang telah selesai uji dan memenuhi ketentuan *timeline*.

4. Alat Pengujian Laboratorium Badan POM yang Dikalibrasi Sesuai Standar

Untuk menjamin validitas pengujian Obat dan Makanan di laboratorium diperlukan alat yang sudah terkalibrasi sesuai standar ISO IEC 17025:2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi. Sampai dengan triwulan III tahun 2024, telah dilakukan kalibrasi terhadap 2.881 peralatan laboratorium Obat dan Makanan

5. Jejaring Pengujian Obat dan Makanan

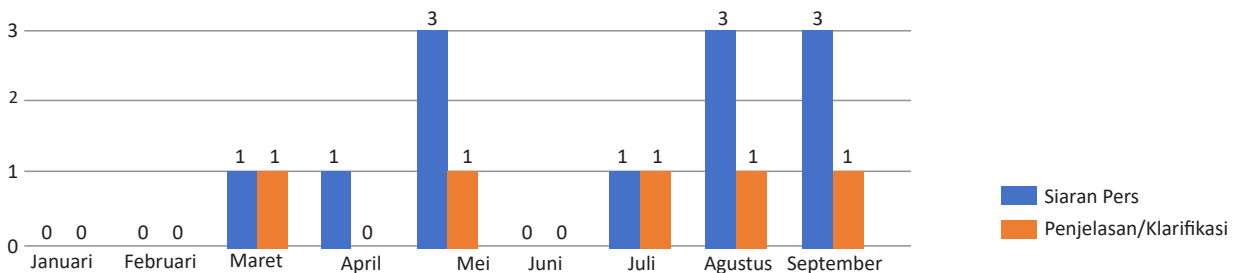
Kegiatan jejaring laboratorium pengujian Obat dan Makanan merupakan kegiatan dalam rangka peningkatan kompetensi dan kapabilitas laboratorium uji, *sharing* informasi dan teknologi terkini yang sesuai dengan target dari jejaring tersebut. Kegiatan dapat berupa pertemuan, uji profisiensi, kolaborasi, pelatihan, *workshop*, FGD yang diikuti oleh laboratorium di lingkungan Badan POM maupun eksternal sesuai lingkup pengujian/keahlian. Pada tahun 2024, Badan POM menargetkan partisipasi dalam 14 jejaring laboratorium. Sampai dengan triwulan III tahun 2024, Badan POM telah berpartisipasi dalam 14 jejaring laboratorium.



BAB 6

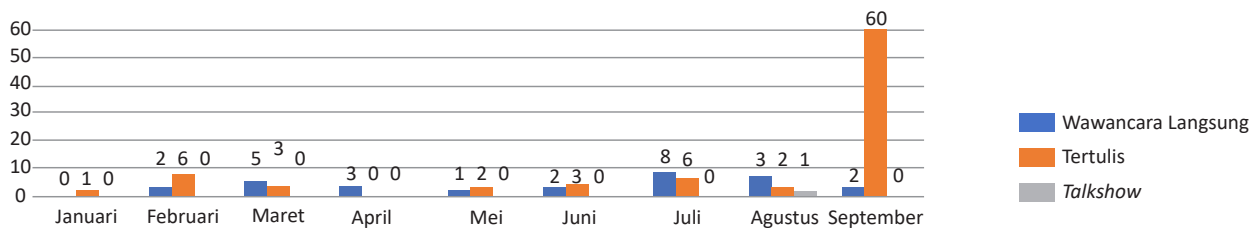
Optimalisasi Pemberdayaan Mitra Kerja dan Masyarakat

Sampai dengan triwulan III tahun 2024, Badan POM telah menerbitkan 12 siaran pers dan 5 penjelasan/klarifikasi terkait isu Obat dan Makanan. Pembahasan isu bervariasi dari berbagai komoditas antara lain obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan olahan, dan umum. Seluruh siaran pers dan penjelasan/klarifikasi dipublikasikan melalui *website* dan media sosial Badan POM.



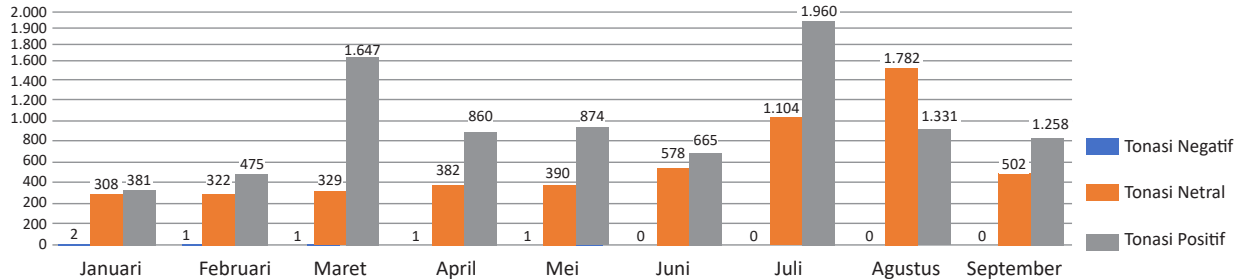
Gambar 12. Jumlah Publikasi Siaran Pers/Penjelasan/Klarifikasi Badan POM s.d. Triwulan III Tahun 2024

Badan POM melakukan kegiatan pelayanan informasi kepada media berupa wawancara, *talkshow* dan pemberian jawaban tertulis. Sampai dengan triwulan III tahun 2024, Badan POM menerima 145 permohonan wawancara dari media. Sebanyak 110 permohonan sudah ditindaklanjuti dengan rincian 26 wawancara langsung, 83 jawaban tertulis, dan 1 *talkshow*.



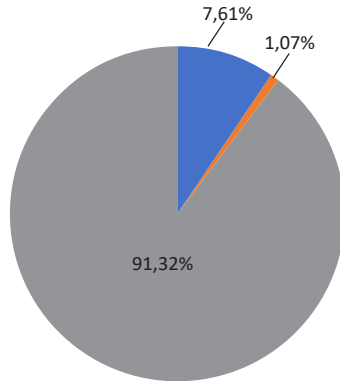
Gambar 13. Data Kegiatan Pelayanan Informasi kepada Media s.d. Triwulan III tahun 2024

Sampai dengan triwulan III tahun 2024, terdapat 15.157 pemberitaan terkait Obat dan Makanan secara umum maupun Badan POM. Dari seluruh pemberitaan tersebut, sejumlah 62,36% bertonasi positif (9.452 berita), 37,59% bertonasi netral (5.697 berita), dan 0,05% bertonasi negatif (8 berita). Tonasi berita positif muncul dari berbagai kegiatan Badan POM serta banyaknya pernyataan Badan POM dalam sebuah isu yang dikutip media, sedangkan tonasi netral muncul dari pemberitaan dengan topik Obat dan Makanan yang tidak mengutip Badan POM.

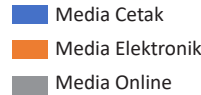


Gambar 14. Tren Tonasi Pemberitaan Terkait Isu Obat dan Makanan s.d Triwulan III Tahun 2024

Tingginya pemberitaan bertonasi positif pada bulan Juli dikarenakan Badan POM mengadakan konferensi pers terkait isu roti berpengawet kosmetik. Badan POM menghentikan produksi serta menarik roti Okko dari peredaran karena menggunakan bahan tambahan pangan (BTP) yang tidak sesuai ketentuan. Pemberitaan bertonasi netral paling banyak muncul pada bulan Agustus disebabkan adanya pelantikan Taruna Ikrar sebagai Kepala Badan POM RI oleh Presiden Joko Widodo sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 114/PPA tahun 2024 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi di Lingkungan Badan POM. Pemberitaan netral lainnya yaitu terkait perkembangan kasus gratifikasi mantan pegawai Badan POM yang ditangani Bareskrim Polri.



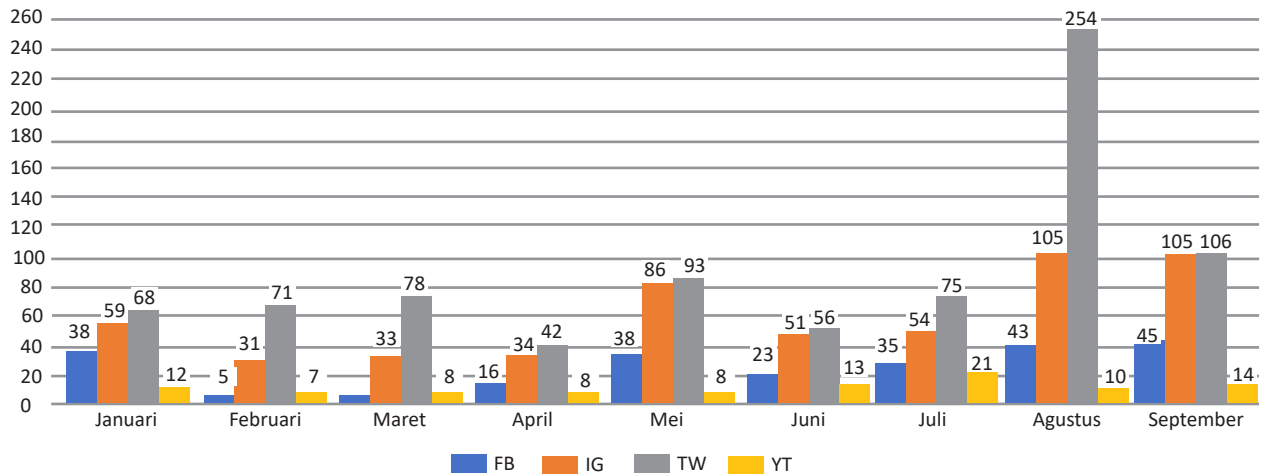
Berdasarkan jenis media, pemberitaan terkait Obat dan Makanan serta Badan POM hampir seluruhnya berasal dari media *online* sebesar 91,32% (13.840 berita), sedangkan media cetak sebesar 7,61% (1.154 berita) dan media elektronik 1,07% (162 berita).



Gambar 15. Sebaran Pemberitaan Isu Obat dan Makanan di Media s.d Triwulan III Tahun 2024

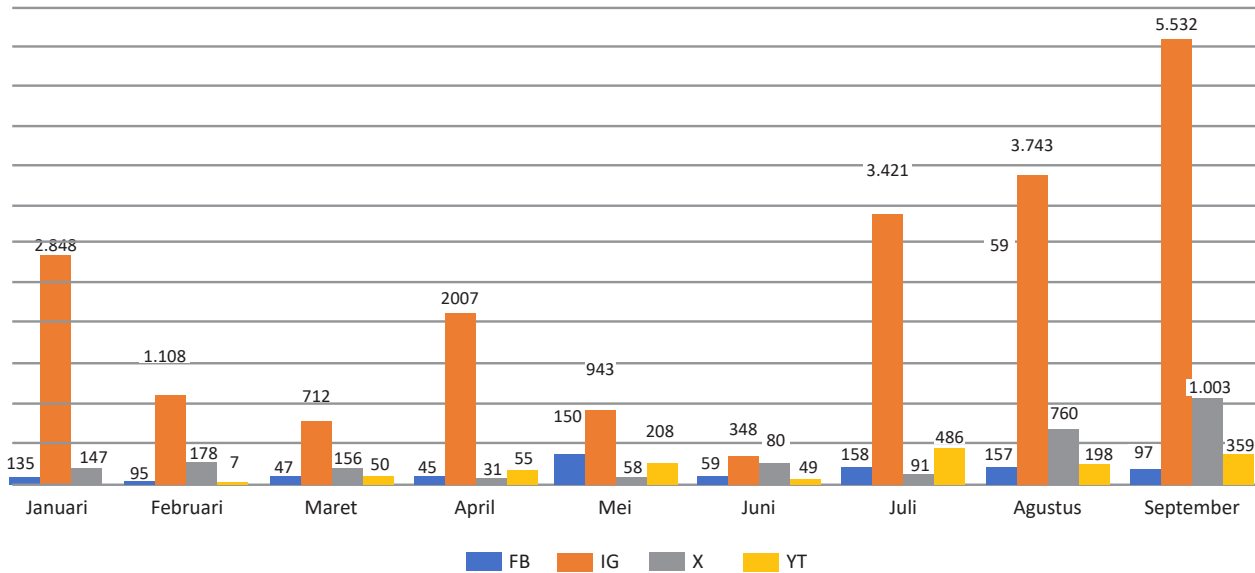
Pada triwulan III tahun 2024, aktivitas media sosial Badan POM pada 4 *platform* media sosial yaitu Facebook, Instagram, X, dan Youtube memiliki rata-rata 3-4 unggahan per hari. *Platform X* merupakan *platform* dengan aktivitas tertinggi yaitu sebanyak 435 *tweets* dibandingkan dengan 3 *platform* media sosial lainnya. Aktivitas tertinggi kedua adalah Instagram dengan 264 unggahan, menyusul Facebook sebanyak 123 unggahan, serta Youtube sebanyak 45 unggahan.

Secara garis besar, total unggahan selama triwulan III pada berbagai *platform* adalah 867 konten, dengan rincian 185 unggahan di bulan Juli, 412 unggahan di bulan Agustus, dan 270 unggahan di bulan September. Rincian jumlah unggahan s.d triwulan III di berbagai *platform* sebagai berikut:



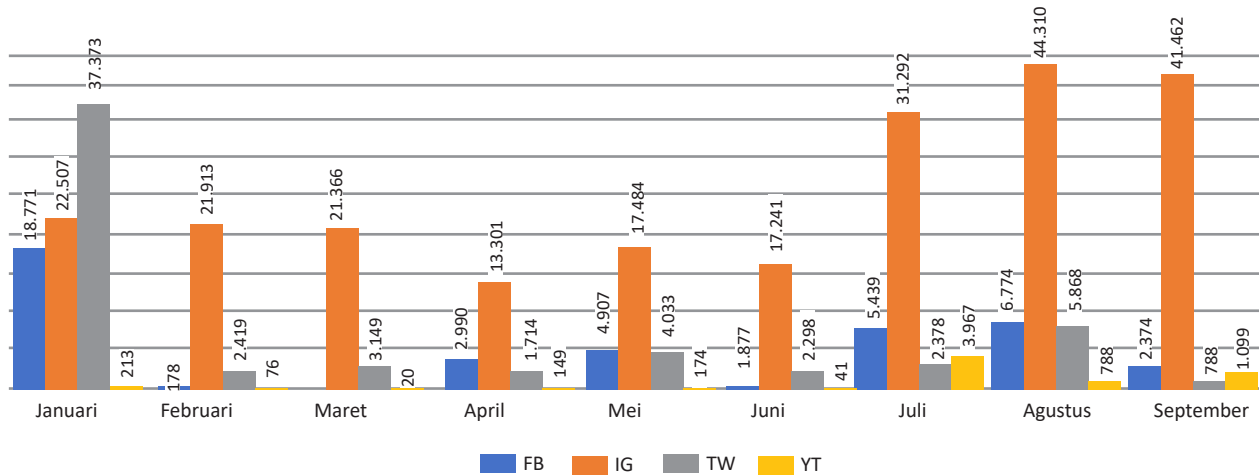
Gambar 16. Total Unggahan Media Sosial Badan POM Berdasarkan Platform s.d Triwulan III Tahun 2024

Sementara itu, pertumbuhan audiens/khalayak/pengunjung pada triwulan III terhadap 4 *platform* media sosial terpantau fluktuatif. Instagram merupakan *platform* dengan total audiens tertinggi pada triwulan III ini dengan jumlah 12.696 audiens, sementara di peringkat kedua *platform* X dengan jumlah 1.854 audiens, dilanjutkan dengan Youtube dengan jumlah 1.043 audiens, dan Facebook dengan 412 audiens. Pertumbuhan audiens tertinggi terjadi pada bulan September yaitu 6.991 audiens, disusul bulan Agustus sebanyak 4.858 audiens dan bulan Juli sebanyak 4.156 audiens.



Gambar 17. Pertumbuhan Audiens Berdasarkan *Platform* s.d Triwulan III Tahun 2024

Pada triwulan III, *engagement* pada setiap *platform* cenderung fluktuatif. *Engagement* tertinggi terjadi pada bulan Agustus, dengan jumlah 57.740, diikuti bulan September 45.623, dan bulan Juli sebesar 43.076. Pertumbuhan jumlah *engagement* sampai dengan triwulan III tahun 2024 sebagai berikut:



Gambar 18. *Engagement* Per Platform s.dTriwulan III Tahun 2024

Top engagement content terkait Badan POM di keempat *platform* pada triwulan III dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 19. *Top Engagement Content* terkait Badan POM pada Platform Facebook, X, Instagram dan Youtube s.d Triwulan III Tahun 2024



Pada triwulan III tahun 2024, Badan POM telah menerbitkan Majalah POM (MaPOM) Vol.6/No.1/2024 dengan mengusung tema utama Mengawasi Sepenuh Hati. Tema ini dipilih untuk memaknai 23 tahun Badan POM menjalankan amanah pengawasan obat dan makanan. Berbagai tantangan dan tempaan dalam menjalankan tugas, menjadi motivasi bagi Badan POM untuk terus tumbuh dan makin kuat. Berdiri mandiri dan menunjukkan eksistensi sebagai lembaga pengawas yang kuat dan tangguh, serta terdepan dalam perlindungan masyarakat Indonesia.

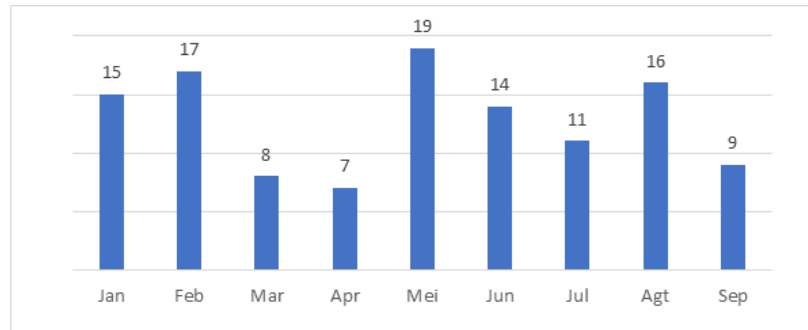


Gambar 20. Majalah Pengawasan Obat dan Makanan (MaPOM) Vol.6/No.1/2024



Gambar 21. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan s.d Triwulan III Tahun 2024

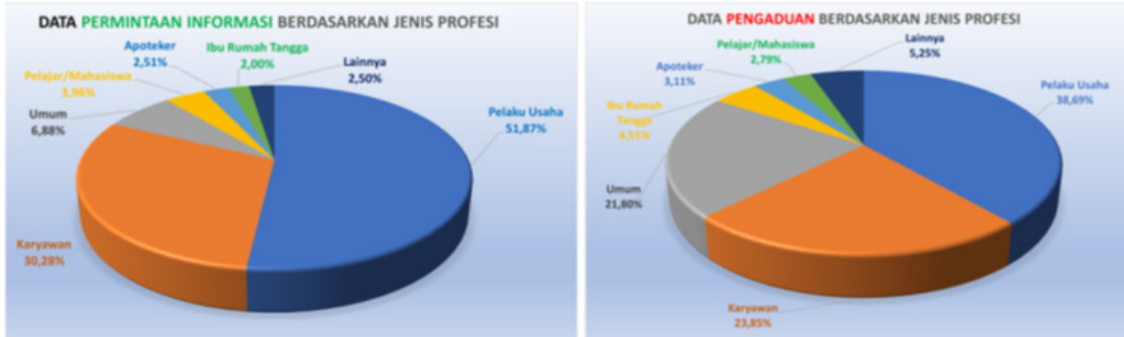
Sampai dengan triwulan III tahun 2024, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Badan POM telah menerima 116 permintaan informasi dari pemohon informasi publik. Profil pemohon informasi berdasarkan profesi yaitu pelajar/mahasiswa (76,70%), karyawan (9,50%), apoteker (2,60%), LSM (1,72%), pelaku usaha (0,86%), PNS/TNI/Polri (0,86%), sarjana hukum (0,86%), dan masyarakat umum lainnya (6,9%).



Gambar 22. Statistik Jumlah Permintaan Informasi Publik pada Triwulan III Tahun 2024

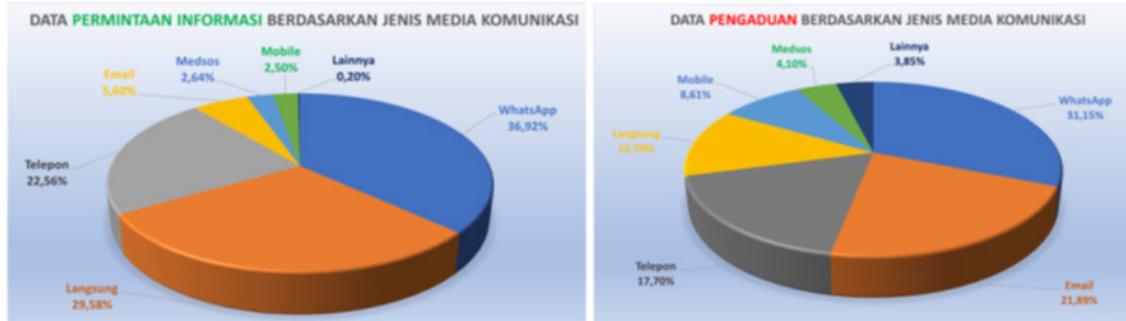
Dari 116 permintaan informasi publik yang diterima oleh Badan POM, sebanyak 100 (86,21%) permintaan informasi dikabulkan sepenuhnya, 11 (9,48%) permintaan informasi yang dikabulkan sebagian, dan 5 (4,31%) permintaan informasi yang ditolak. Permintaan informasi yang dikabulkan sebagian karena terdapat informasi yang tidak dikuasai dan termasuk ke dalam Klafikasi Informasi yang Dikecualikan berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Seluruh permintaan informasi dapat diselesaikan sesuai jangka waktu penyelesaian yaitu tidak lebih dari 17 hari kerja dengan rata-rata waktu penyelesaian adalah 3,91 hari kerja.

Berdasarkan data pengaduan masyarakat dan layanan informasi Obat dan Makanan sampai dengan triwulan III tahun 2024, Badan POM telah melaksanakan layanan pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan melalui ULPK Pusat dan 76 Balai Besar/Balai/Loka POM di seluruh Indonesia serta *Contact Center* HALOBPOM sebanyak 36.496 layanan, terdiri dari 35.276 (96,66%) layanan permintaan informasi dan 1.220 (3,34%) layanan pengaduan.



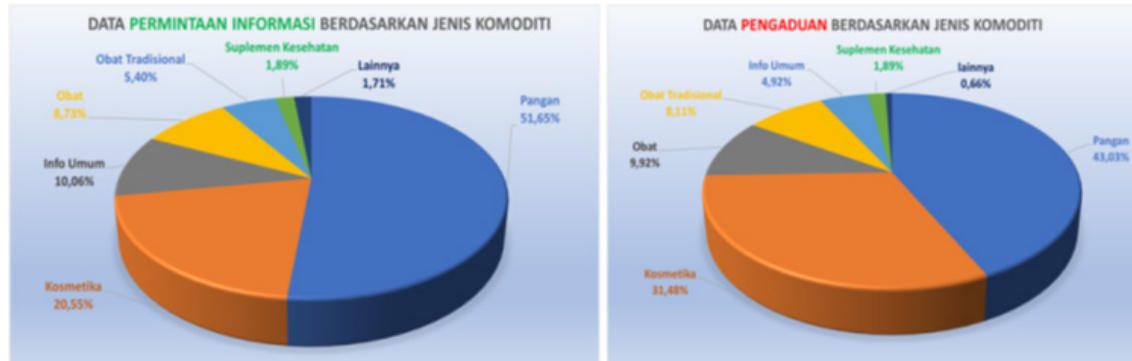
Gambar 23. Profil Pengguna Layanan Informasi dan Pengaduan Badan POM Berdasarkan Profesi

Profil profesi masyarakat yang mengakses layanan informasi sebagian besar berasal dari pelaku usaha sebanyak 18.298 (51,87%) layanan dan karyawan sebanyak 10.680 (30,28%) layanan. Adapun pengaduan sebagian besar dari pelaku usaha sebanyak 472 (38,69%) layanan dan karyawan sebanyak 291 (23,85%) layanan.



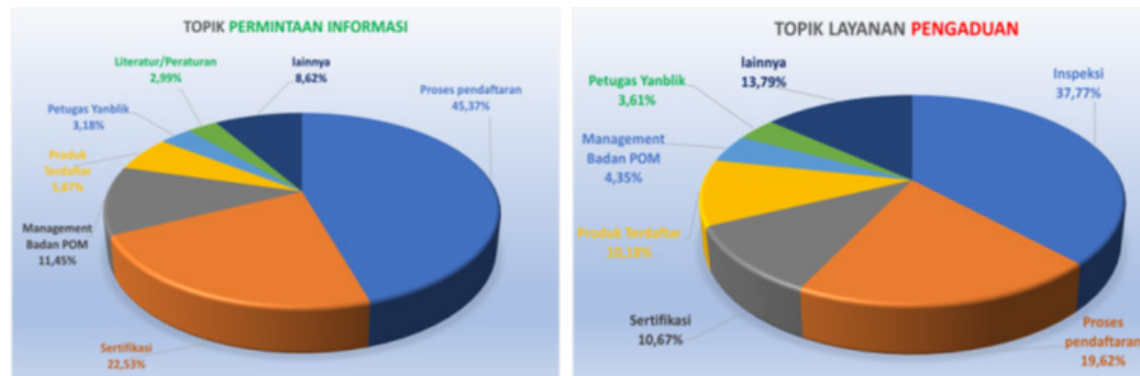
Gambar 24. Profil Media Permintaan Layanan Informasi dan Pengaduan Badan POM

Media komunikasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat dalam mengakses layanan informasi yaitu aplikasi *WhatsApp* sebanyak 13.024 (36,92%) layanan dan langsung sebanyak 10.433 (29,58%) layanan, sementara untuk media pengaduan yang paling banyak digunakan oleh masyarakat yaitu *WhatsApp* sebanyak 380 (31,15%) layanan dan *email* sebanyak 267 (21,89%) layanan.



Gambar 25. Profil Layanan Informasi dan Pengaduan yang Diberikan oleh Badan POM Berdasarkan Komoditi

Berdasarkan komoditi, informasi yang banyak ditanyakan masyarakat yaitu terkait pangan sebanyak 18.221 (51,65%) layanan dan kosmetika sebanyak 7.250 (20,55%). Adapun komoditi yang banyak diadukan yaitu pangan sebanyak 525 (43,03%) layanan dan kosmetika sebanyak 381 (31,48%) layanan.



Gambar 26. Topik Layanan Informasi dan Pengaduan yang Diberikan atau Ditanyakan kepada Badan POM

Topik informasi yang paling banyak ditanyakan oleh masyarakat yaitu terkait proses pendaftaran sebanyak 15.978 (45,37%) layanan dan sertifikasi sebanyak 7.934 (22,53%) layanan. Topik lain yang sering ditanyakan antara lain informasi tentang informasi magang/penelitian oleh mahasiswa, informasi ketersediaan bahan pembanding untuk

penelitian, informasi prosedur kunjungan, informasi nomor kontak unit teknis di Badan POM, pengujian laboratorium, peraturan terkait pengawasan Obat dan Makanan, informasi legalitas produk, konsultasi desain kemasan produk, Informasi Nilai Gizi, dan tanggal kedaluwarsa. Adapun topik pengaduan yang banyak diadukan yaitu tentang inspeksi produk sebanyak 460 (37,77%) layanan dan proses pendaftaran seperti *timeline* pendaftaran produk, sebesar 239 (19,62%) layanan.



BAB 7

Digitalisasi Pelayanan Publik

1. 2D Barcode

Kebijakan implementasi 2D Barcode sudah berlangsung selama 6 tahun sejak ditetapkan pada tahun 2018. Dalam rangka percepatan implementasi 2D Barcode, Badan POM melakukan pendampingan kepada pelaku usaha serta sosialisasi kepada masyarakat. Beberapa strategi percepatan implementasi yang telah dilakukan oleh Badan POM pada periode triwulan III tahun 2024 antara lain desk konsultasi kepada 6 (enam) pelaku usaha, dan melakukan layanan helpdesk teknis dan substansi melalui e-mail sebanyak 277 laporan.

2. BPOM Mobile

BPOM Mobile merupakan bentuk inovasi dalam strategi komunikasi Badan POM yang akan bermanfaat dalam menunjang peran dan fungsi Badan POM, masyarakat dan stakeholder dalam kebersamaan membangun kehidupan bangsa. BPOM Mobile juga merupakan salah satu bentuk dukungan implementasi digitalisasi atau e-government yang bermanfaat dalam peningkatan aksesibilitas yang lebih mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari Badan POM. Pada triwulan III tahun 2024, BPOM Mobile diperkaya dengan penyempurnaan fitur pengaduan, sebelumnya hanya berupa 2 filter yang ada pada Pilih Kategori Pengaduan, lalu untuk triwulan III ditambahkan submenu Pengaduan/Permintaan Informasi Umum dan Pengaduan Efek Samping.



Gambar 27. Tampilan Menu Pengaduan pada Aplikasi BPOM Mobile

Inovasi teknologi dalam pengawasan Obat dan makanan melalui pembangunan aplikasi BPOM *Mobile* dimulai sejak 2018. Aktivitas BPOM *Mobile* dari 2018 sampai dengan triwulan III tahun 2024 sebagai berikut:



Gambar 28. Aktivitas BPOM *Mobile* Tahun 2018 s.d Triwulan III Tahun 2024

3. Aplikasi *Gateway Online Single Submission*

Sistem *Gateway Online Single Submission* (OSS) dan Pajak merupakan penunjang integrasi data antara Badan POM dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Dengan terintegrasinya aplikasi layanan publik Badan POM dengan OSS RBA, maka BKPM bersama Badan POM secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi integrasi tersebut. Sebagai dasar penarikan produk beredar yang telah mendapatkan perizinan melalui OSS RBA, Badan POM melakukan pertemuan bersama BKPM untuk mengetahui konsep pengawasan sesuai PP No. 5 Tahun 2021 yang diimplementasikan pada OSS RBA.

Pada triwulan III tahun 2024, Badan POM mengadakan kegiatan monitoring dan evaluasi integrasi Sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (Sistem OSS RBA) dengan Sistem Pelayanan Publik Badan POM yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2024. Pada kegiatan ini, dilakukan pembahasan terkait Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU). Hasil pembahasan sebagai berikut:

- a. BKPM merekomendasikan untuk proses pengajuan Surat Keterangan Ekspor tetap dilakukan melalui aplikasi milik Badan POM karena tidak masuk dalam PP 5 dan sudah terintegrasi dengan sistem Indonesia *National Single Window*.
- b. Pemanfaatan *endpoint inquiryFileDS* akan dimaksimalkan dan diperkuat dengan pemberian notifikasi kepada pelaku usaha jika ada perubahan data teknis yang berdampak pada lampiran PB-UMKU. Pelaku

usaha dapat melakukan cetak PB-UMKU terbaru dan menjadi trigger untuk pengiriman PB-UMKU tersebut ke sistem Badan POM kembali.

- c. Tercatat 2.410 permohonan PB-UMKU sektor Obat dan Makanan per 5 September 2024 dengan status Menunggu Verifikasi Persyaratan yang perlu dikonsolidasikan agar sesuai SLA yang telah ditetapkan.
- d. BKPM telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan mengenai fitur PNBPN yang akan diimplementasikan dalam sistem OSS.
- e. Kementerian Investasi/BKPM akan menyusun mekanisme pemberitahuan jika terdapat pelaksanaan maintenance atau terjadi gangguan pada sistem OSS-RBA agar para pemangku kepentingan mengetahui informasi tersebut.
- f. Kementerian, lembaga, atau organisasi nirlaba tidak diwajibkan untuk mengajukan perizinan melalui OSS karena OSS ditujukan untuk kepentingan berusaha.
- g. Produk pangan akan segera diwajibkan memiliki sertifikasi halal. Idealnya pelaku usaha dapat mengajukan izin edar dan sertifikasi halal secara paralel dalam sistem OSS. Gagasan ini akan disampaikan kepada pimpinan terlebih dahulu. Diskusi mengenai kesiapan sistem juga perlu dilakukan secara kolaboratif.
- h. Kendala ID Izin hilang dapat disebabkan oleh pencabutan mandiri oleh pelaku usaha pada proyek yang terkait dengan PB-UMKU. Jika diperlukan, BKPM dapat mengaktifkan kembali proyek tersebut berdasarkan kasus per kasus.

4. Pengembangan Data dan Informasi pada Badan POM *Command Center*

Badan POM *Command Center* (BCC) merupakan salah satu fasilitas yang diperlukan oleh institusi dalam menjalankan *Crisis Management* atau *Business Continuity Management*. BCC memiliki fungsi untuk mendukung tindakan tanggap darurat, *action plan* untuk perbaikan dan pemulihan, serta langkah penyediaan informasi publik. Adapun kegiatan Pengembangan Data dan Informasi pada BCC yang sudah direalisasikan pada Triwulan III Tahun 2024 sebagai berikut :

- a. Reviu Dashboard Kedeputian I
- b. Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi *Generative AI*
- c. Reviu Dashboard Kedeputian II
- d. Menerima Kunjungan Balai POM di Manokwari
- e. Kunjungan BCC - Bangladesh *Food Safety Authority* (BFSA)
- f. Kunjungan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Azwar Anas

5. Sistem Informasi Pelaporan Terpadu

Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) sebagai sarana pencatatan dan pelaporan hasil pengawasan Obat dan Makanan terus disempurnakan sesuai dengan arah kebijakan pengawasan terbaru. Fokus penyempurnaan SIPT pada triwulan III yaitu pada pengembangan modul tindak lanjut pengawasan (CAPA) untuk kegiatan pemeriksaan sarana maupun sampling pengujian. Modul ini terintegrasi dengan Aplikasi SMARTPOM yang nantinya akan digunakan oleh Pelaku Usaha sebagai tools pelaporan hasil tindak lanjut / perbaikan (CAPA). Diharapkan pengembangan modul ini dapat mendukung tugas pengawasan obat dan makanan yang lebih komprehensif, efektif, dan berkesinambungan.

Dalam mendukung pengawasan pemeriksaan sarana yang lebih optimal, telah dilakukan penyempurnaan pada form pemeriksaan sarana yang berfokus pada penyempurnaan form pelaporan, perbaikan format ekspor data maupun perbaikan UI/UX untuk memudahkan evaluator dalam melakukan monitoring dan evaluasi melalui aplikasi SIPT. Selain itu, telah dilakukan simplifikasi alur evaluasi data pengawasan pada semua modul di Aplikasi SIPT. Hal ini bertujuan untuk mendorong pada percepatan proses evaluasi yang dilakukan oleh unit teknis pengawasan terhadap data pengawasan yang telah dilaporkan oleh UPT dilingkungan Badan POM. Pengawasan *post-market* produk senantiasa dilakukan oleh Badan POM dalam upaya memastikan produk obat dan makanan aman dikonsumsi oleh masyarakat.



Gambar 29. Integrasi SIPT dengan Aplikasi SMARTPOM

6. SMARTPOM

Peningkatan Peningkatan kualitas pengawasan di daerah serta peningkatan peran Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara menyediakan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Pengawasan Obat dan Makanan atau yang biasa disebut DAK Nonfisik POM. Pengalokasian DAK Nonfisik POM yang ditujukan kepada Pemda bertujuan untuk membantu meningkatkan efektivitas kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di daerah. Untuk mempermudah tahapan perencanaan dan monitoring serta evaluasi kegiatan yang menggunakan alokasi anggaran DAK Nonfisik POM, Badan POM mengembangkan aplikasi SMARTPOM. Pada triwulan III tahun 2024, sudah dilakukan pemanfaatan dari pengembangan aplikasi pada menu DAK Non Fisik 2024 dan telah digunakan oleh Dinas Kesehatan yang mendapatkan dana DAK Non Fisik 2024 untuk melakukan pelaporan dana DAK Non Fisik 2024 dan telah dibuatkan alur tindak lanjut CAPA.



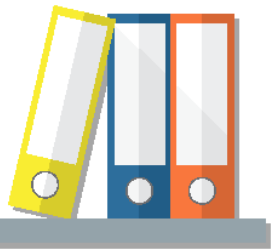
Gambar 30. Tampilan Menu *Login* pada Aplikasi SMART POM

7. Layanan Helpdesk Pusdatin

Aplikasi *Help* Pusdatin (ITSM) merupakan aplikasi pengelolaan katalog layanan Pusdatin yang menjadi media komunikasi antara pegawai Badan POM di seluruh Indonesia sebagai pengguna layanan dengan Pusdatin sebagai pengelola layanan. Dalam aplikasi ini terdapat 2 macam layanan yang disediakan yaitu permohonan dan pengaduan. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi aplikasi *Help* Pusdatin pada periode triwulan III tahun 2024, total pengajuan permohonan dan pengaduan adalah sebanyak 2.034 layanan yang terdiri dari 739 permohonan dan 1.295 pengaduan. Rata-rata waktu tindak lanjut yaitu 2 – 3 hari untuk permohonan dan 3 – 4 hari untuk pengaduan.



Gambar 31. *Dashboard* Data Pengajuan pada Layanan Helpdesk Pusdatin



BAB 8

Perkuatan Peraturan Perundang-Undangan Pengawasan Obat dan Makanan

1. Penyusunan Regulasi

Sampai dengan triwulan III tahun 2024, telah ditetapkan 17 Peraturan Badan POM, 51 Keputusan/Surat Edaran Kepala Badan POM, dan 80 Rumusan Perjanjian.

Judul Peraturan Badan POM

1. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Persyaratan dan Tata Cara Permohonan Analisis Hasil Pengawasan dalam Rangka Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.
2. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama melalui Seleksi Terbuka di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
3. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penanganan Pengaduan atas Dugaan Pelanggaran di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga.
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pencabutan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan.
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan.

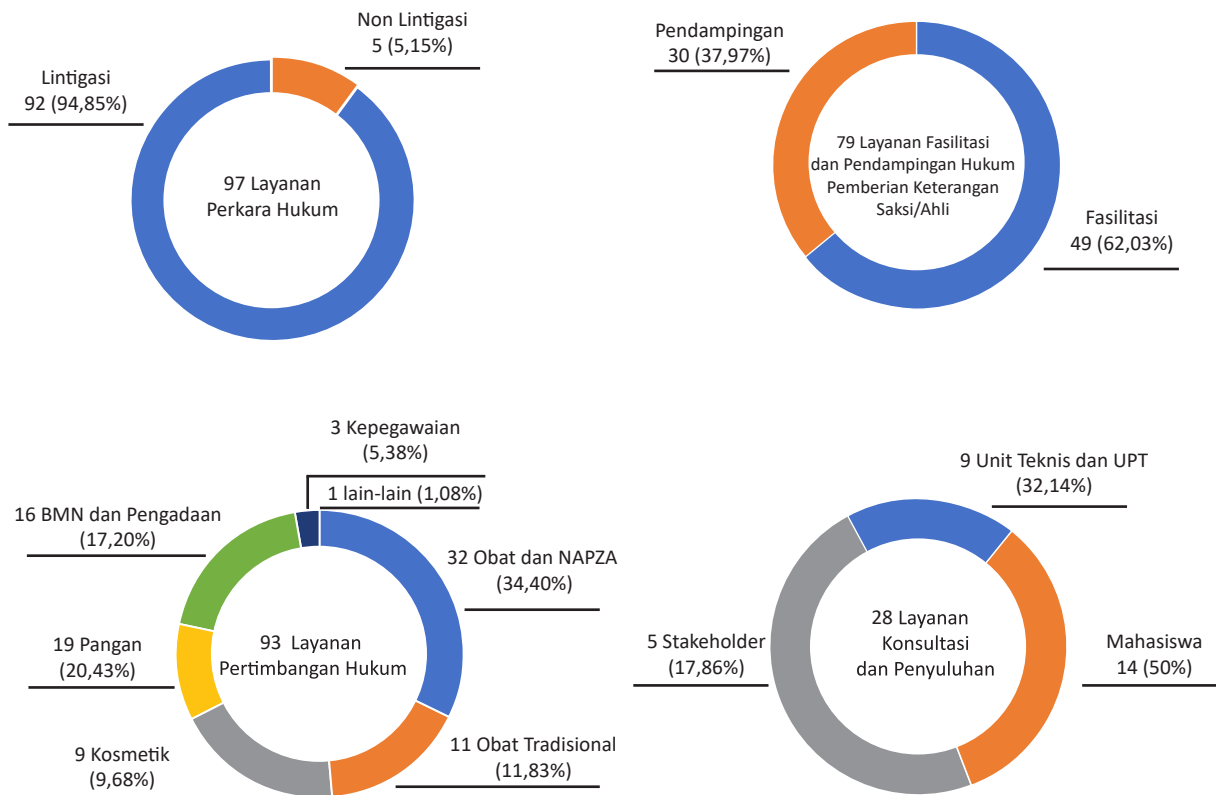


7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik.
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tata Laksana Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik.
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, Dan Zat Adiktif.
10. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penandaan Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Dan Suplemen Kesehatan.
11. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat Dan Makanan Tahun Anggaran 2024.
12. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pemasukan Obat dan Bahan Obat Melalui Mekanisme Jalur Khusus (*Special Access Scheme*).
13. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
14. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan secara Daring.
15. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Suplemen Kesehatan.
16. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Batas Cemaran dalam Kosmetik.
17. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik di Rumah Sakit.

2. Layanan Advokasi Hukum

Setiap instansi pemerintah perlu mempertimbangkan aspek hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya agar pengambilan kebijakan dan pelaksanaan tugas-tugas dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tidak menimbulkan implikasi hukum yang berisiko bagi organisasi.

Salah satu aspek hukum adalah layanan advokasi hukum yang terdiri dari pelaksanaan pertimbangan hukum, pelaksanaan penanganan perkara hukum, pelaksanaan pendampingan kepada saksi/ahli serta pelaksanaan konsultasi dan penyuluhan hukum. Jumlah dan jenis layanan advokasi hukum yang sudah dilakukan oleh Badan POM sampai dengan triwulan III tahun 2024 yaitu 297 layanan yang terdiri dari:



Gambar 32. Layanan Advokasi Hukum yang Diberikan oleh Badan POM s.d. Triwulan III Tahun 2024



BAB 9

Penguatan dan Penataan Organisasi dan Tata Laksana serta Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

1. Penataan dan Penguatan Organisasi

Badan POM melakukan penataan organisasi untuk terciptanya organisasi yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program pembangunan nasional. Penataan organisasi merupakan proses evaluasi terhadap struktur organisasi Badan POM *existing* baik pada organisasi induk maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT). Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik dan mendukung pembangunan dan kemajuan daerah secara keseluruhan, Badan POM telah melakukan penataan kepada UPT dilingkungan Badan POM melalui:

- a. Evaluasi klasifikasi UPT Badan POM tahun 2024 telah terhadap 76 UPT menggunakan instrumen pada Peraturan Badan POM Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kriteria Klasifikasi UPT pada Badan POM. Seluruh data yang digunakan pada evaluasi klasifikasi UPT Badan POM tahun 2024 bersumber dari Laporan Tahunan UPT Badan POM tahun 2023. Berdasarkan hasil evaluasi klasifikasi UPT Badan POM didapatkan hasil sebagai berikut:
 - 1) Peningkatan 17 Loka POM menjadi Balai POM
 - 2) Peningkatan 2 Balai POM menjadi Balai Besar POM
- b. Pengubahan Lokasi UPT
- c. Penyempurnaan Nomenklatur UPT

Hasil penataan UPT dilingkungan Badan POM ini telah disusun ke dalam Naskah Urgensi Penataan Organisasi UPT Badan POM Tahun 2024 serta disampaikan kepada Kementerian PANRB melalui surat Plt. Kepala Badan POM kepada Menteri PANRB tanggal 8 Agustus 2024.

2. Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Sehubungan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) tahun 2024, Badan POM berkomitmen melaksanakan tugas melalui penerapan birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing guna mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan RB Badan POM, telah dilakukan Kunjungan Kerja Menteri PANRB ke Badan POM tanggal 13 Agustus 2024.



3. Tata Laksana

a. *Entry Meeting* Evaluasi atas Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Badan POM

Pelaksanaan *Entry Meeting* Evaluasi atas Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Badan POM merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP telah mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D dan memutuskan nilai akhir atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP, Manajemen Risiko Indeks, dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi.

Kegiatan *Entry meeting* dilaksanakan secara *hybrid* pada 5 Agustus 2024 di Aula Bhinneka Tunggal Ika Badan POM dengan melibatkan Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Tim Evaluator BPKP, Tim Penjaminan Kualitas, Sekretariat Tim Penilaian SPIPT, Perwakilan Tim Asesor dan Tim *Counterpart* Unit Kerja Pusat dan Balai Besar. Berdasarkan dari proses evaluasi penilaian yang dilakukan, diharapkan akan mendorong Badan POM untuk dapat mengidentifikasi dan merencanakan perbaikan sesuai kebutuhan pada *area for improvement*. Hal ini untuk memastikan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mampu mengangkat Badan POM pada kinerja terbaiknya dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.

b. *Entry Meeting* Audit Eksternal ISO 9001:2015, ISO 37001:2016, dan ISO 45001:2018 Badan POM

Berdasarkan pada Keputusan Kepala Badan POM Nomor 133 Tahun 2024 tentang Penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi (*Integrated Management System*) Badan POM, pelaksanaan *Entry Meeting* Audit Eksternal ISO 9001:2015, ISO 37001:2016, dan ISO 45001:2018 Badan POM merupakan agenda penting untuk PT Sucofindo sebagai Penyedia Jasa Konsultansi Surveilans QMS ISO Badan POM Tahun Anggaran 2024 untuk menyampaikan program mutu Audit Eksternal ISO 9001:2015, ISO 37001:2016, dan ISO 45001:2018 kepada seluruh Satuan Kerja yang akan diaudit.

Kegiatan *Entry Meeting* dilaksanakan secara luring dan daring melalui media *Zoom Meeting* pada 9 September 2024 dengan melibatkan para Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama Unit Pusat, dan Kepala Balai Besar selaku Ketua Tim Penjamin Mutu beserta tim penjaminan mutu yang telah dibentuk berdasarkan Keputusan Sekretaris Utama Nomor HK.02.02.2.05.24.105 Tahun 2024 tentang Tim Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Badan POM. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini yaitu diperolehnya gambaran yang sama dalam teknis pelaksanaan Audit Eksternal Sistem Manajemen Terintegrasi di lingkungan Badan POM. Ketentuan dan batasan-batasan yang telah disepakati agar dapat dicermati dan menjadi panduan dalam setiap proses pelaksanaan audit.

c. *Exit Meeting* Penyampaian Simpulan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Badan POM

Pelaksanaan *Exit Meeting* Evaluasi atas Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Badan POM merupakan kegiatan penyampaian simpulan hasil evaluasi atas penilaian mandiri penyelenggaraan SPIP terintegrasi Badan POM oleh Tim Evaluator BPKP dengan sampel pada Satuan Kerja Penanggung Jawab yaitu Inspektorat Utama dan Sekretariat Utama dan beberapa Satuan Kerja Wajib terpilih baik di Pusat maupun di UPT seperti Balai Besar POM di Yogyakarta dan Balai Besar POM di Makassar.

Kegiatan *Exit meeting* dilaksanakan secara *hybrid* pada 17 September 2024 di Aula Bhinneka Tunggal Ika Badan POM dengan melibatkan Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Direktur Pengawasan Bidang Sosial dan Penanganan Bencana BPKP, Tim Evaluator BPKP, Tim Penjaminan Kualitas, Sekretariat Tim Penilaian SPIPT, Perwakilan Tim Asesor dan Tim *Counterpart* Unit Kerja Pusat dan Balai Besar. Berdasarkan hasil evaluasi dan saran yang diberikan oleh BPKP terkait penilaian mandiri maturitas SPIPT Badan POM ini dapat menjadi peluang bagi Badan POM untuk menyempurnakan sistem yang telah berjalan.



BAB 10

Kerjasama Internasional

1. Penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)* antara Badan POM dengan *Tanzania Medicines & Medical Devices Authority (TMDA)*



Badan POM dan TMDA telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) bersama pada bulan September 2024. MoU yang ditandatangani bertujuan untuk menyederhanakan proses regulasi bagi produk farmasi Indonesia yang ingin memasuki pasar Tanzania. Hal ini menandai pencapaian penting dalam upaya memperluas pasar farmasi Indonesia di Afrika.

Salah satu poin utama dalam MoU yang ditandatangani adalah Badan POM mendorong implementasi *regulatory reliance* dengan TMDA. Dengan demikian, TMDA dapat mengandalkan hasil evaluasi obat dan inspeksi *Good Manufacturing Practice (GMP)* yang telah dilakukan oleh Badan POM. Hal ini akan mempercepat proses registrasi dan perizinan produk farmasi Indonesia di Tanzania sehingga meningkatkan akses masyarakat Tanzania terhadap obat-obatan yang mereka butuhkan. Selain itu, TMDA Tanzania akan mendapatkan dukungan peningkatan kapasitas regulasi dari Badan POM untuk membangun sistem regulasi yang lebih kuat di negaranya.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Badan POM menyampaikan bahwa melalui kemitraan ini, Badan POM dapat semakin memperkokoh posisinya sebagai otoritas regulasi yang diakui secara internasional, tidak hanya membuka

akses pasar bagi industri farmasi nasional, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesehatan masyarakat di Tanzania.

2. *Joint Symposium* dan Pertemuan Bilateral Badan POM dengan *Ministry of Food and Drug Safety (MFDS)* Korea



Pada tanggal 11 September 2024, Badan POM bekerja sama dengan *Ministry of Food and Drug Safety (MFDS)* Korea menyelenggarakan *Joint Symposium* serta pertemuan bilateral di Hotel Intercontinental, Jakarta. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari *Memorandum of Understanding (MoU)* yang telah ditandatangani oleh kedua lembaga pada tahun 2021. Acara ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan, khususnya di bidang farmasi dan pengawasan obat.

Rangkaian Kegiatan *Symposium* terdiri dari 3 kegiatan utama, yaitu:

- a. *Opening Ceremony* : acara dibuka oleh Kepala Badan POM, perwakilan MFDS melalui video, serta perwakilan dari Kementerian Kesehatan RI dan Kedutaan Besar Korea di Indonesia.
- b. Sesi Paparan Industri : diikuti oleh presentasi dari perwakilan industri Korea dan Indonesia terkait teknologi terbaru dalam bidang biofarmasi dan obat sintetik kimia. Narasumber dari Indonesia, yaitu Direktur PT Kalbio Global Medika menyampaikan perkembangan biofarmasi di Indonesia dan Dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) yang memaparkan topik mengenai Model Prediktif Kejahatan Pangan dan Obat-obatan.

- c. Sesi Pemerintah : MFDS memaparkan pengalamannya dalam menghadapi WLA *assessment*, regulasi produk ATMPs, serta sistem pharmacovigilance. Badan POM memaparkan kebijakan terkait registrasi dan persetujuan izin obat, termasuk mekanisme *reliance* dengan negara referensi.



Di samping pelaksanaan *Joint Symposium*, Badan POM juga melakukan pertemuan bilateral dengan MFDS yang fokus membahas beberapa isu penting, antara lain:

- a. Kerja Sama di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan
Badan POM mengajukan proposal terkait *benchmarking* di bidang WLA, investigasi kriminal terkait Obat dan Makanan, serta radiofarmaka;
- b. Diskusi Pencabutan Pengujian *Ethylene Oxide* (ETO)
MFDS meminta pencabutan persyaratan sertifikat uji ETO untuk mie instan Korea yang diekspor ke Indonesia. Badan POM berkomitmen untuk memberikan keputusan setelah melakukan verifikasi data di lapangan.
- c. Penguatan Kerja Sama
MFDS menyampaikan undangan kepada Badan POM untuk berpartisipasi dalam kegiatan *capacity building* terkait sistem keamanan pangan.

Melalui *Joint Symposium* dan pertemuan bilateral ini, Badan POM dan MFDS berhasil memperkuat kerja sama strategis yang diharapkan akan berdampak positif dalam peningkatan kapasitas regulasi dan inovasi di kedua negara.





BAB 11

Sumber Daya Manusia

1. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Sampai dengan triwulan III tahun 2024, total pegawai di Badan POM sebanyak 5.360 pegawai yang terdiri dari 4.846 orang PNS, 513 PPPK, dan 1 POLRI/Jaksa. Demografi pegawai di Badan POM berdasarkan gender terdiri dari 1.519 orang (28,34%) laki-laki dan 3.841 orang (71,66%) perempuan. Sedangkan berdasarkan tipe kepegawaian, pegawai Badan POM terdiri dari 4.746 orang (88,54%) Fungsional, 445 orang (8,30%) Pelaksana, dan 169 orang (3,15%) Struktural..

2. Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung program sertifikasi dan uji kompetensi, pengembangan kompetensi, pengelolaan pengetahuan organisasi, serta pembinaan Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM), selama triwulan III tahun 2024 Badan POM mengelola 8 aplikasi dengan monitoring dan evaluasi pemanfaatan aplikasi sebagai berikut:

a. LSP BPOM

LSP Badan POM selaku unit pelaksana sertifikasi melakukan sertifikasi kompetensi di bidang keamanan pangan bagi Penyuluh Keamanan Pangan Pertama (PKP Pertama) dan Inspektur Muda Keamanan Pangan (*District Food Inspector Junior*) di Lingkungan Pemerintah Daerah dan internal Badan POM dengan pelaksanaan menggunakan aplikasi aplikasi LSP Badan POM (<https://lspbpom.pom.go.id>). Hasil pemanfaatan aplikasi LSP Badan POM sampai dengan triwulan III tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 4. Hasil Evaluasi Pemanfaatan Aplikasi LSP BPOM s.d. Triwulan III Tahun 2024

No.	Uraian	Jumlah	Kompeten		Belum Kompeten	
			Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1.	Sertifikasi Kompetensi PKP Pertama	439	437	99%	1	1%
2.	Sertifikasi Kompetensi DFI Junior	476	467	98%	9	2%
Total		915	904	99%	10	1%

b. PENKOMTEK

Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan penilaian kompetensi, pemberian umpan balik dan monitoring penggunaan aplikasi penilaian kompetensi teknis (PENKOMTEK) (<https://penkomtek.pom.go.id/>) sampai dengan triwulan III tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 5. Hasil Monitoring Pemanfaatan Aplikasi PENKOMTEK s.d. Triwulan III Tahun 2024

No.	Keterangan	Periode	Jumlah Peserta yang diterima	Jumlah Peserta yang ditolak
1.	Pemetaan Kompetensi	Februari	110	0
2.	Uji Kompetensi	Februari	119	18
3.	Pemetaan Kompetensi	Maret	25	0
4.	Pemetaan Kompetensi	Mei	40	0
5.	Uji Kompetensi	Mei	159	7
6.	Pemetaan Kompetensi	Juni	57	0
7.	Pemetaan Kompetensi	Juli	5	0
8.	Pemetaan Kompetensi	Agustus	95	0
9.	Uji Kompetensi	Agustus	121	9
10.	Pemetaan Kompetensi	September	136	0
Total			867	34

c. SIPENATEMANKU

Penilaian kompetensi yang selama ini dilakukan yaitu Uji Kompetensi dan Pemetaan kompetensi secara *online* dengan menggunakan Aplikasi Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural, serta Psikotes Online (SIPENATEMANKU) (https://asesmen.pom.go.id). Hasil penilaian kompetensi sampai dengan triwulan III tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 6. Hasil Monitoring Pemanfaatan Aplikasi SIPENATEMANKU s.d. Triwulan III Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah Peserta		Waktu Pelaksanaan
		SJT	AC	
1	Ukom Pengangkatan Kembali	-	1	10 Januari 2024
2	Ukom Pengangkatan Kembali	-	1	5 Februari 2024

No	Uraian	Jumlah Peserta		Waktu Pelaksanaan
		SJT	AC	
3	Pemetaan BBPOM di Medan, Loka POM di Kab. Toba, dan Loka POM di Kota Tanjung Balai	64	-	29 Januari 2024
		-	13	12 Februari 2024
4	Pemetaan BPOM di Jambi dan Loka POM di Kab. Bungo	53	-	29 Januari 2024
		-	3	19 Maret 2024
5	Pemetaan BPOM di Pangkal Pinang dan Loka POM di Kab. Belitung	38	-	29 Januari 2024
		-	2	19 Maret 2024
6	Pemetaan Pusat Batch 1	55	-	27 Maret 2024
7	Ukom Batch 1	56	-	23 Februari 2024
		-	20	22-29 Februari 2024
8	Pemetaan BPOM di Batam dan Loka POM di Kota Tanjung Pinang	27	-	28 Mei 2024
		-	1	13-27 Juni 2024
9	Pemetaan BBPOM di Pekanbaru, Loka POM di Kota Dumai, dan Loka POM di Kab. Indragiri Hulu	55	-	28 Mei 2024
		-	8	13-27 Juni 2024
10	Pemetaan BPOM di Mamuju	20	-	28 Mei 2024
		-	1	13-27 Juni 2024
11	Ukom April (Pemenuhan data talenta)	2	-	29 April 2024
12	Ukom Batch 2	52	-	3 Juni 2024
		-	49	3-7 Juni 2024
13	Pemetaan Balai POM di Kupang, Loka POM di Kab. Manggarai Barat, Loka POM di Kab. Belu, Loka POM di Kab. Sumba Timur, dan Loka POM di Kab. Ende	63	-	5 Agustus 2024
		-	3	11 September 2024
14	Pemetaan Balai POM di Gorontalo	28	-	16 Juli 2024
15	Pemetaan Balai Besar POM di Samarinda, Balai POM di Tarakan, dan Loka POM di Kota Balikpapan	48	-	16 Juli 2024
		-	3	11 September 2024
16	Pemetaan Balai Besar POM di Serang dan Balai POM di Tangerang	58	-	16 Juli 2024
		-	5	11 September 2024

No	Uraian	Jumlah Peserta		Waktu Pelaksanaan
		SJT	AC	
17	Pemetaan Balai POM di Palu & Loka POM di Kab. Banggai	51	-	16 Juli 2024
		-	7	11 September 2024
18	Pemetaan Susulan & PPPK Juli	279	-	30-31 Juli 2024
19	Pemetaan PPPK Agustus	184	-	1 Agustus 2024
20	Ukom Batch 3	58	-	3 September 2024
		-	30	4 September 2024

d. ERUDITIO

Badan POM juga menerbitkan jurnal terkait pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia melalui aplikasi ERUDITIO (<https://eruditio.pom.go.id/index.php/home>). Jurnal dan artikel yang sudah diterbitkan pada periode tahun 2020-2024 berjumlah 7 jurnal dan 45 artikel. Progres yang sedang dilakukan sampai dengan triwulan III tahun 2024 yaitu sedang dilakukan proses *Call For Paper*.

e. CMC

Sampai dengan triwulan III tahun 2024, sudah terlaksana kegiatan *coaching* dan *mentoring* melalui aplikasi CMC Badan POM (<https://ppsdm.pom.go.id/panel/cmc>). Jumlah kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan triwulan III tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 7. Hasil Monitoring Pemanfaatan Aplikasi CMC s.d. Triwulan III Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah		
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III
1	Kegiatan Coaching	15 Kegiatan	3 Kegiatan	23 Kegiatan
2	Kegiatan Mentoring	9 Kegiatan	9 Kegiatan	3 Kegiatan

f. SIMPHONI

Badan POM memiliki aplikasi SIMPHONI yang merupakan *platform knowledge management*. Aplikasi SIMPHONI memungkinkan pegawai atau unit kerja di Badan POM untuk *sharing* data, informasi, dan pengetahuan ke pegawai atau unit kerja lain. Badan POM telah melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan pengetahuan organisasi melalui publikasi data/pengetahuan/ informasi pada aplikasi SIMPHONI (<https://ppsdm.pom.go.id/simponi>). Sampai dengan triwulan III tahun 2024, jumlah total data yang telah dimanfaatkan yaitu sejumlah 322 data.

g. IDEAS

Aplikasi *Integrated Development and Training Information System (IDEAS)* merupakan *platform* pengembangan kompetensi digital terintegrasi di Badan POM. Aplikasi tersebut memiliki fitur *online shopping training* atau pelatihan tidak terjadwal yaitu fitur yang memfasilitasi pegawai untuk mengikuti pembelajaran secara *online* kapanpun dan di manapun dengan memanfaatkan modul materi di aplikasi IDEAS. Keunggulan lain dari IDEAS berupa penerbitan sertifikat *online* di mana semua data pengembangan kompetensi pada IDEAS terintegrasi dengan <https://siasn.pom.go.id>. Data monitoring dan evaluasi pemanfaatan aplikasi IDEAS selama triwulan III tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Hasil Monitoring Pemanfaatan Aplikasi IDEAS s.d. Triwulan III Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah			
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Total
1	Pegawai BPOM yang belajar IDEAS	2.124	1.042	551	3.717 (65%)
2	ASN Non BPOM yang belajar IDEAS	5	5	36	46
3	Pelaku usaha yang belajar di IDEAS	2	0	20	22
4	Akun eksternal yang belajar di IDEAS	459	307	307	1073
5	Modul terbaru yang diupload	16	11	12	39
6	Webinar yang dilaksanakan	11	12	14	37

h. SIASN

Kegiatan perencanaan pengembangan kompetensi Badan POM dapat di monitoring oleh masing-masing Unit Kerja di aplikasi/modul Pengembangan Kompetensi pada <https://siasn.pom.go.id>. Hasil monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi Badan POM yang telah mencapai 20 Jam Pembelajaran (JP) sampai dengan triwulan III tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 9

Tabel 9. Hasil Monitoring Pengembangan Kompetensi pada Aplikasi SIASN s.d. Triwulan III Tahun 2024

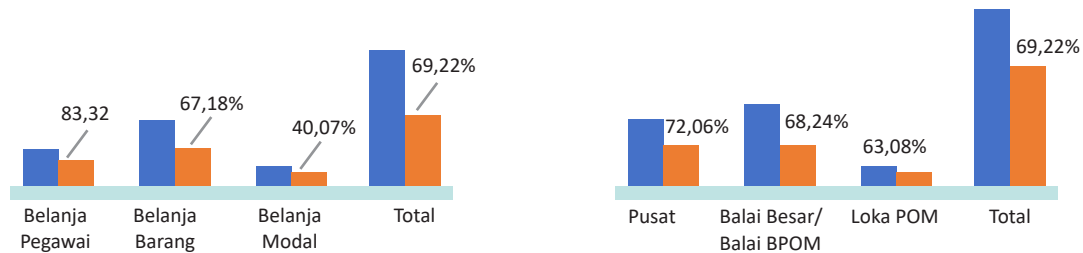
No	Uraian	Persentase
1.	Pegawai yang mengikuti pelatihan	
	a. Sudah mengikuti	99,30%
	b. Belum mengikuti	0,70%
2.	Pegawai yang mencapai 20 JP pengembangan kompetensi	
	a. Sudah mencapai 20 JP	93,10%
	b. Belum mencapai 20 JP	6,90%



BAB 12

Realisasi Anggaran Sampai dengan September 2024

Total anggaran Badan POM Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.354.321.946.000,- untuk seluruh kegiatan di pusat maupun daerah. Anggaran yang terdiri dari: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal. Anggaran tersebut tersebar untuk 30 Satker Pusat, 42 Balai Besar/Balai POM dan 31 Loka POM. Realisasi anggaran per September tahun 2024 sebesar, Rp1.629.766.390.450 (69,22%) yang terdiri dari realisasi anggaran untuk Satker Pusat Rp613.746.517.123 realisasi anggaran untuk seluruh Balai Besar/Balai POM Rp901.296.181.943 ,dan realisasi anggaran untuk Loka POM sebesar Rp114.723.691.384.



Gambar 33. Realisasi Anggaran s.d September 2024

Unit Kerja	Pagu	Realisasi	%
Pusat	851.737.345.000	613.746.517.123	72,06%
Balai Besar/ Balai POM	1.320.724.834.000	901.296.181.943	68,24%
Loka POM	181.859.758.000	114.723.691.384	63,08%
Total	2.354.321.946.000	1.629.766.390.450	69,22%

	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Total
Pagu	804.229.184.000	1.248.740.096.000	301.352.666.000	2.354.321.946.000
Realisasi	670.069.826.691	838.935.860.916	120.760.702.843	1.629.766.390.450
%	83,32%	67,18%	40,07%	69,22%



BAB 13

Pemantauan Capaian Rencana Kerja Pemerintah (RKP) BPOM

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, BPOM secara rutin telah melakukan pemantauan pelaksanaan RKP BPOM Tahun 2024. Pemantauan dilakukan terhadap perkembangan realisasi anggaran serta realisasi pencapaian sasaran kegiatan dan pencapaian sasaran program dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, juga kendala yang dihadapi untuk dapat segera diidentifikasi upaya tindak lanjut yang dibutuhkan. Pemantauan capaian RKP dilakukan per bulan. Hasil pemantauan capaian RKP sampai dengan September tahun 2024 sebagaimana terlampir pada buku ini.



Penutup

Kinerja yang ditampilkan dalam laporan ini hanya sebagian dari kinerja keseluruhan BPOM. Namun demikian para pihak terkait diharapkan mendapat gambaran jelas bahwa program dan kegiatan BPOM berorientasi pada pencapaian tujuan utama pembangunan pengawasan obat dan makanan 2021-2024 yaitu meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut BPOM akan terus berupaya untuk meningkatkan kinerjanya pada masa mendatang, dengan mengutamakan niat baik, komitmen, keterbukaan, perencanaan yang komprehensif (termasuk anggaran), pelaksanaan aksi, evaluasi dan analisis hasil, serta *continuous Improvement*.



LAMPIRAN I



Matriks Capaian Indikator Kinerja Program dan Kegiatan BPOM

S.D. Triwulan III Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2024	Satuan	Realisasi s.d TW III 2024	Capaian (%)
A.	Program Pengawasan Obat dan Makanan					
		Indeks Pengawasan Obat	91	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	89	Indeks	-	Akhir Tahun
		Persentase UMKM Obat Tradisional yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap	96.7	%	-	Akhir Tahun
		Indeks Pengawasan Makanan	86	Indeks	-	Akhir Tahun
		Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar	359	Kab/Kota	-	Akhir Tahun
		Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	51	%	-	Akhir Tahun
1.1	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Persentase Obat yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	94.75	%	94.68	99.92%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	86	%	90.35	105.06%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	91	%	92.35	101.48%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	81.5	%	88.89	109.07%
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90	%	92.64	102.93%

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2024	Satuan	Realisasi s.d TW III 2024	Capaian (%)
		Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	86	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	92	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	83	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	91.29	Indeks	-	Akhir Tahun
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	95	%	98.49	103.67%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di masing-masing wilayah kerja UPT	75	%	81.01	108.01%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	97	%	94.33	97.25%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	70	%	69.82	99.74%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	71	%	75.93	106.94%
		Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	4.51	Indeks	4.85	107.54%
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	81	%	78.54	96.97%
		Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	97	Nilai	96.06	99.03%

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2024	Satuan	Realisasi s.d TW III 2024	Capaian (%)
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	3424	Sekolah	Progress 76,77%	
		Jumlah desa pangan aman di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	1106	Desa	Progress 74,08%	
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	453	Pasar	Progress 84,90%	
		Persentase sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	%	62.32	62.32%
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	%	63.81	63.81%
		Persentase keberhasilan penindakan obat dan makanan	81	%	63.64	78.57%
		Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai Standar Kemampuan laboratorium/GLP	91	%	-	Akhir Tahun
1.2	Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi di Direktorat Cegah Tangkal yang optimal	3	Indeks	3.00	100.00%
		Indeks profesionalisme ASN Direktorat Cegah Tangkal	90	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks RB Direktorat Cegah Tangkal	92.1	Indeks	-	Akhir Tahun
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	99	Nilai	-	Akhir Tahun
		Persentase analisis kejahatan Obat dan Makanan yang berkualitas	91	%	100.00	109.89%
		Persentase data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan yang akurat	92.5	%	90.17	97.48%
		Persentase penggalangan dalam rangka cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang mendapat respon positif	100	%	100.00	100.00%
		Persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti	92.9	%	48.00	51.67%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Cegah Tangkal	92	%	95.00	103.26%

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2024	Satuan	Realisasi s.d TW III 2024	Capaian (%)
1.3	Intelijen Obat dan Makanan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang optimal	3	Persen	2.75	91.67%
		Indeks profesionalitas ASN Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	89.13	Persen	-	Akhir Tahun
		Indeks RB Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	89.35	Persen	-	Akhir Tahun
		Jumlah profil jaringan kejahatan Obat dan Makanan yang terpetakan	3	Jaringan	-	Akhir Tahun
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	94.74	Nilai	-	Akhir Tahun
		Persentase laporan informasi dan laporan intelijen UPT yang sesuai prosedur	80	%	-	Akhir Tahun
		Persentase laporan informasi yang sesuai standar	88	%	85.88	97.59%
		Persentase laporan intelijen yang sesuai standar	88	%	80.00	90.91%
		Persentase rekomendasi intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas	86	%	84.62	98.40%
		Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	92	%	75.00	81.52%
1.4	Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	91.75	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks pelayanan publik di bidang pengawasan OT dan SK	4.9	Indeks	4.93	100.61%
		Indeks pengelolaan data dan informasi Unit Kerja Direktorat Pengawasan OT dan SK yang optimal	3	Indeks	3.00	100.00%
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	92.2	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	92.09	Indeks	-	Akhir Tahun
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	97.5	Nilai	-	Akhir Tahun

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2024	Satuan	Realisasi s.d TW III 2024	Capaian (%)
		Persentase iklan OT dan SK yang memenuhi ketentuan	78.5	%	82.38	104.94%
		Persentase keputusan hasil pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	88	%	90.61	102.97%
		Persentase laporan keamanan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang ditindaklanjuti tepat waktu	98.5	%	99.64	101.16%
		Persentase pemenuhan pedoman pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan oleh UPT	98.5	%	100.00	101.52%
		Persentase permohonan penilaian sarana dan produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	92	%	92.02	100.02%
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	81	%	82.04	101.28%
		Persentase sarana Produksi OT yang memenuhi persyaratan CPOTB	89	%	90.42	101.60%
		Persentase UPT yang dilakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	72	%	-	Akhir Tahun
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	100	%	100.00	100.00%
1.5	Pengawasan Produksi Pangan Olahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Direktorat Pengawasan Produksi Pangan olahan	87.5	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks pelayanan publik di Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	4.55	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang baik	3	Indeks	2.50	83.33%
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	90.81	Indeks	-	Akhir Tahun

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2024	Satuan	Realisasi s.d TW III 2024	Capaian (%)
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	92	Indeks	-	Akhir Tahun
		Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan pengawasan produksi pangan olahan sesuai standar	350	Kab/Kota	-	Akhir Tahun
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	97.5	Nilai	-	Akhir Tahun
		Persentase industri pangan olahan yang menerapkan Manajemen Risiko	95	%	86.01	90.54%
		Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan produksi	72	%	-	Akhir Tahun
		Persentase Keputusan Hasil Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	98.3	%	99.33	101.05%
		Persentase Keputusan penilaian sarana Produksi Pangan Olahan yang diselesaikan tepat waktu	95	%	90.80	95.58%
		Persentase Koordinasi pengawasan produksi pangan fortifikasi yang dilaksanakan	90	%	56.76	63.07%
		Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Pengawasan Produksi Pangan Olahan Oleh UPT BPOM sesuai dengan NSPK	95	%	-	Akhir Tahun
		Persentase Peningkatan Industri pangan olahan yang telah mengimplementasikan SJKPMP	25	%	-	Akhir Tahun
		Persentase Tingkat Pengetahuan Pelaku Usaha dan masyarakat terhadap Pengawasan produksi yang diberikan	94.6	%	95.14	100.57%
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang baik	100	%	100.00	100.00%
1.6	Pengawasan Kosmetik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan kosmetik	87	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks Pelayanan Publik di bidang Pengawasan Kosmetik	4.65	Indeks	4.78	102.80%

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2024	Satuan	Realisasi s.d TW III 2024	Capaian (%)
		Indeks Pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan kosmetik yang optimal	3	Indeks	3.00	100.00%
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan kosmetik	87.41	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks RB Direktorat Pengawasan kosmetik	93.19	Indeks	-	Akhir Tahun
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	96.33	Nilai	-	Akhir Tahun
		Persentase hasil pengawasan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh Lintas sektor	85	%	85.63	100.74%
		Persentase iklan kosmetik yang memenuhi ketentuan	70.05	%	72.34	103.27%
		Persentase keputusan hasil pengawasan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	89	%	89.79	100.89%
		Persentase laporan keamanan Kosmetik yang ditindaklanjuti tepat waktu	92	%	97.72	106.22%
		Persentase pemenuhan Ketentuan pengawasan Kosmetik oleh Balai Besar/ Balai POM/Loka POM	98	%	100.00	102.04%
		Persentase permohonan penilaian sarana dan produk kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	94	%	94.11	100.12%
		Persentase sarana Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan	81	%	81.79	100.98%
		Persentase UPT yang di lakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan kosmetik	86	%	83.33	96.90%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan kosmetik	100	%	90.00	90.00%
1.7	Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	Indeks kepuasan stakeholder terhadap pelayanan publik di bidang distribusi obat,	93.5	%	94.03	100.57%
		Indeks Pelayanan Publik Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP	4.65	Indeks	4.94	106.24%

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2024	Satuan	Realisasi s.d TW III 2024	Capaian (%)
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Dit. Was. Distribusi dan Pelayanan ONPP yang optimal	3	%	3.00	100.00%
		Indeks Profesionalitas ASN Dit.Was. Distribusi dan Pelayanan ONPP	87.21	%	81.69	93.67%
		Indeks RB Dit. Was. Distribusi dan Pelayanan ONPP	93.33	%	-	Akhir Tahun
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	96.94	%	-	Akhir Tahun
		Persentase keputusan hasil pengawasan di bidang distribusi dan pelayanan obat yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	81	Indeks	-	Akhir Tahun
		Persentase keputusan hasil pengawasan pengelolaan obat pemasukan jalur khusus yang diselesaikan	97	%	100.00	103.09%
		Persentase keputusan hasil pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian yang diselesaikan	95.5	%	97.46	102.05%
		Persentase Keputusan Penilaian Sarana Distribusi Obat yang Diselesaikan tepat waktu	96	%	96.37	100.39%
		Persentase pemenuhan standar pengawasan sarana distribusi dan pelayanan obat oleh Balai	88	%	86.70	98.52%
		Persentases stakeholder yang mendapat regulatory assistance di bidang distribusi dan pelayanan obat	85	%	71.43	84.04%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran di Dit.Was. Distribusi dan Pelayanan ONPP	100	%	100.00	100.00%
1.8	Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Indeks Kepatuhan Industri Produk Tembakau dalam label dan iklan	55.2	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks Kepatuhan pelaku usaha dalam mutu dan keamanan Obat dan NPP	93.5	Indeks	-	Akhir Tahun

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2024	Satuan	Realisasi s.d TW III 2024	Capaian (%)
		Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang pengawasan iklan obat dan ekspor impor obat, narkotika, psikotropika dan prekursor.	92	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks Pelayanan Publik di Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	4.7	Indeks	4.87	103.62%
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif yang optimal	3	Indeks	3.00	100.00%
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	91.26	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	95.43	%	-	Akhir Tahun
		Jumlah label dan iklan produk tembakau yang diawasi yang memenuhi ketentuan	60800	Label dan Iklan	51691.00	85.02%
		Jumlah permohonan ekspor impor Obat dan NPP yang diselesaikan tepat waktu	18300	Permohonan	19376.00	105.88%
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	89.68	Nilai	-	Akhir Tahun
		Persentase laporan Farmakovigilans yang ditindaklanjuti	80.2	%	80.24	100.05%
		Persentase laporan pengawasan mutu, label dan iklan obat dan NPP yang ditindaklanjuti	88	%	91.41	103.88%
		Persentase permohonan persetujuan iklan obat yang diselesaikan tepat waktu	78	%	69.94	89.67%
		Tingkat Efektivitas KIE di bidang Obat	93.91	%	98.51	104.90%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	98	%	100.00	102.04%

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2024	Satuan	Realisasi s.d TW III 2024	Capaian (%)
1.9	Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	90	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks Pelayanan Publik di Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	4.85	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan yang Optimal	3	Indeks	3.00	100.00%
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	90.56	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	91.95	Indeks	-	Akhir Tahun
		Jumlah Kab/Kota yang Melaksanakan Pengawasan Post Market sesuai Standar	350	Kab/Kota	-	Akhir Tahun
		Jumlah Sarana Peredaran yang Menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO) Peredaran	3000	sarana	2917.00	97.23%
		Jumlah Surat Keterangan Ekspor/Impor Pangan yang diselesaikan tepat waktu	67000	Permohonan	57772.00	86.23%
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	96.25	Nilai	-	Akhir Tahun
		Persentase Instansi Pemerintah yang berperan aktif dalam Pengawasan Makanan	95	%	-	Akhir Tahun
		Persentase Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai Standar	96.5	%	99.56	103.17%
		Persentase Pelaku Usaha dan Masyarakat yang Meningkatkan Pengetahuannya Terhadap Implementasi Peraturan Peredaran Pangan Olahan yang baik	87.7	%	95.32	108.69%
		Persentase UPT BPOM yang Melakukan Pengawasan sesuai Standar	84.1	%	-	Akhir Tahun
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan yang Baik	95	%	88.00	92.63%

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2024	Satuan	Realisasi s.d TW III 2024	Capaian (%)
1.10	Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang pengawasan sarana produksi obat	91	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks Pelayanan Publik	4.85	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan Produksi ONPP yang optimal	3	Indeks	2.50	83.33%
		Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Produksi ONPP	91.22	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Produksi ONPP	94.1	Indeks	-	Akhir Tahun
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	97.75	Nilai	-	Akhir Tahun
		Persentase fasilitas produksi produk JKN dan produk high risk lainnya serta bahan baku yang diawasi sesuai standar	94	%	69.23	73.65%
		Persentase hasil pengawasan sarana produksi yang ditindaklanjuti	80	%	75.00	93.75%
		Persentase keputusan penilaian fasilitas produksi bahan baku obat, obat, produk biologi dan sarana khusus yang diselesaikan tepat waktu	85	%	78.99	92.93%
		Persentase sarana produksi obat JKN, bahan baku obat, dan obat high risk lainnya yang mematuhi persyaratan CPOB	76	%	59.15	77.83%
		Persentase sarana produksi obat yang mandiri dalam pemenuhan CPOB	77.2	%	89.58	116.04%
		Persentase tahapan pemenuhan fasilitas produksi obat dan bahan baku obat baru yang diterbitkan keputusan dalam rangka pengawasan	85	%	77.50	91.18%
		Persentase tindak lanjut yang berkualitas dari hasil pengawasan sarana produksi di Balai	100	%	62.50	62.50%
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Produksi ONPP	100	%	100.00	100.00%

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2024	Satuan	Realisasi s.d TW III 2024	Capaian (%)
1.11	Registrasi Pangan Olahan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Registrasi Pangan Olahan	87	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks pelayanan publik di Direktorat Registrasi Pangan Olahan	4.9	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Registrasi Pangan Olahan yang optimal	3	Indeks	3.00	100.00%
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Registrasi Pangan Olahan	91.5	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks RB Direktorat Registrasi Pangan Olahan	97	Indeks	-	Akhir Tahun
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	97.5	Nilai	-	Akhir Tahun
		Persentase hasil penilaian registrasi Pangan Olahan yang diselesaikan tepat waktu	95	%	97.01	102.12%
		Persentase keputusan registrasi pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar	86	%	73.80	85.81%
		Persentase pangan olahan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu sebelum diedarkan	91	%	77.60	85.27%
		Persentase pendampingan di bidang registrasi pangan olahan yang efektif	99.6	%	100.00	100.40%
		Persentase pengaduan terkait registrasi Pangan Olahan yang ditindaklanjuti	100	%	100.00	100.00%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Registrasi Pangan Olahan	100	%	95.00	95.00%
1.12	Registrasi Obat	Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang registrasi Obat	90.75	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks pelayanan publik di Registrasi Obat	4.8	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Registrasi Obat yang optimal	3	Indeks	3.00	100.00%
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Registrasi Obat	92.54	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks RB Direktorat Registrasi Obat	91.3	Indeks	-	Akhir Tahun

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2024	Satuan	Realisasi s.d TW III 2024	Capaian (%)
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	96.96	Nilai	-	Akhir Tahun
		Persen pengaduan/keluhan/ masukan terkait registrasi Obat yang ditindaklanjuti	100	%	100.00	100.00%
		Persentase hasil penilaian registrasi obat yang diselesaikan tepat waktu	82	%	78.05	95.18%
		Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar registrasi obat	100	%	100.00	100.00%
		Persentase keputusan registrasi obat yang diselesaikan sesuai standar	78	%	74.88	96.00%
		Persentase obat yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebelum diedarkan	90	%	96.41	107.12%
		Persentase sarana UK/Lab BE yang diinspeksi dan memenuhi CUKB	90	%	92.31	102.57%
		Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Registrasi Obat	100	%	95.00	95.00%
1.13	Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di bidang registrasi OT, SK, Notifikasi Kosmetik, Penilaian Uji Praliniak/Klinik dan DIP	89.5	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks pelayanan publik di Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praliniak/ Klinik	4.85	Indeks	4.92	101.44%
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos yang optimal	3	Indeks	3.00	100.00%
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos	91.74	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks RB Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos	93.14	Indeks	-	Akhir Tahun
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	96.55	Nilai	-	Akhir Tahun

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2024	Satuan	Realisasi s.d TW III 2024	Capaian (%)
		Persentase hasil penilaian registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praklinik/klinik dan DIP yang diselesaikan tepat waktu	90	%	95.33	105.92%
		Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar di lingkup registrasi obat tradisional	90	%	89.38	99.31%
		Persentase keputusan registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Notifikasi Kosmetik yang diselesaikan sesuai standar	83.5	%	89.00	106.59%
		Persentase OT, SK dan Kos yang memenuhi syarat keamanan dan mutu sebelum diedarkan	93	%	91.73	98.63%
		Persentase pendampingan di bidang registrasi OT, SK, Notifikasi Kosmetik, Penilaian Uji Praklinik/Klinik dan DIP yang efektif	82	%	87.20	106.34%
		Persentase pengaduan terkait registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praklinik/ Klinik dan DIP yang ditindaklanjuti	90	%	94.71	105.23%
		Tingkat Efektivitas penggunaan anggaran Direktorat Registrasi OT, SK dan Kosmetik	100	%	92.00	92.00%
1.14	Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	90.25	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	85.6	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks Pelayanan Publik di Bidang Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	4.45	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal	3	Indeks	3.00	100.00%

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2024	Satuan	Realisasi s.d TW III 2024	Capaian (%)
		Indeks Profesional ASN Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	92.14	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks RB Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	91.51	Indeks	-	Akhir Tahun
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	94.7	Nilai	-	Akhir Tahun
		Persentase permohonan pengkajian keamanan, mutu, dan khasiat/manfaat Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	99	%	99.00	100.00%
		Persentase sosialisasi standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang efektif kepada stakeholder	95	%	92.12	96.97%
		Persentase standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang disusun dibanding dengan yang direncanakan	100	%	73.00	73.00%
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	100	%	100.00	100.00%
1.15	Standardisasi Pangan Olahan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	89	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks kualitas kebijakan pengawasan pangan olahan	85.68	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks pelayanan publik di bidang standardisasi pangan olahan	4.9	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Direktorat Standardisasi Pangan Olahan yang optimal	3	Indeks	3.00	100.00%
		Indeks profesionalitas ASN Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	91.6	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks Reformasi Birokrasi Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	86.94	Indeks	-	Akhir Tahun
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	97.5	Nilai	-	Akhir Tahun

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2024	Satuan	Realisasi s.d TW III 2024	Capaian (%)
		Persentase fasilitasi pengembangan inovasi makanan melalui standar	96	%	91.42	95.23%
		Persentase permohonan pengkajian keamanan, mutu, gizi dan manfaat pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu	95	%	100.00	105.26%
		Persentase sosialisasi standar pangan olahan kepada stakeholder yang efektif	92	%	95.89	104.23%
		Persentase standar pangan olahan yang sudah disusun sesuai timeline tahapan penyusunan	97	%	72.11	74.34%
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	100	%	92.00	92.00%
1.16	Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang standardisasi ONPPZA	85.5	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat	93.79	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks Pelayanan Publik Direktorat Standardisasi ONPPZA	4.5	Indeks	4.78	106.22%
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Standardisasi ONPPZA yang optimal	3	Indeks	3.00	100.00%
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Standardisasi ONPPZA	90.35	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks RB Direktorat Standardisasi ONPPZA	91.79	Indeks	-	Akhir Tahun
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	94.8	Nilai	-	Akhir Tahun
		Persentase sosialisasi standar ONPPZA kepada stakeholder yang efektif	95	%	-	Akhir Tahun
		Persentase standar ONAPPZA yang disusun dibanding dengan yang direncanakan	95.5	%	79.71	83.47%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Standardisasi ONPPZA	100	%	95.00	95.00%

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2024	Satuan	Realisasi s.d TW III 2024	Capaian (%)
1.17	Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	91.75	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks pelayanan publik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha	4.9	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	3	Indeks	3.00	100.00%
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	91.65	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks RB Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	92.6	Indeks	-	Akhir Tahun
		Jumlah Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	260	Kader/fasilitator	252.00	96.92%
		Jumlah Kab/Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)	380	Kab/Kota	70.00	18.42%
		Jumlah kader yang memahami prinsip keamanan pangan	980	Kader/fasilitator	1129.00	115.20%
		Jumlah pemda dan stakeholder yang diintervensi keamanan pangan	574	Pemda	420.00	73.17%
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	97.5	Nilai	-	Akhir Tahun
		Persentase Fasilitator yang melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan sesuai Pedoman	74	%	70.00	94.59%
		Persentase Kab/Kota yang menerapkan peraturan keamanan pangan untuk IRTF	40	%	80.00	200.00%
		Persentase kader keamanan pangan yang berpartisipasi dalam pengawasan makanan	99.2	%	74.17	74.77%
		Persentase UPT BPOM yang melakukan pendampingan pelaku usaha dan pemberdayaan masyarakat terkait keamanan pangan sesuai pedoman	90	%	-	Akhir Tahun

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2024	Satuan	Realisasi s.d TW III 2024	Capaian (%)
		Tingkat efektivitas KIE Makanan	96	%	95.12	99.08%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	94	%	95.00	101.06%
1.18	Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik di PPOMN	96.25	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks Pelayanan Publik PPOMN	4.95	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi PPOMN yang optimal	3	Indeks	3.00	100.00%
		Indeks Profesionalitas ASN PPOMN	90.79	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks RB PPOMN	91.89	Indeks	-	Akhir Tahun
		Nilai AKIP PPOMN	85.25	Nilai	-	Akhir Tahun
		Nilai Kinerja Anggaran PPOMN	93.23	Nilai	-	Akhir Tahun
		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	70	Nilai	-	Akhir Tahun
		Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	84	Nilai	-	Akhir Tahun
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	97.53	Nilai	-	Akhir Tahun
		Persentase alat laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang dikalibrasi sesuai standar	100	%	81.66	81.66%
		Persentase Baku Pembanding yang ditetapkan sesuai kebutuhan	100	%	97.31	97.31%
		Persentase jejaring laboratorium Obat dan Makanan yang diikuti secara aktif	100	%	100.00	100.00%
		Persentase laboratorium Balai Besar / Balai POM sesuai standar Kemampuan Laboratorium	91.18	%	-	Akhir Tahun
		Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan	100	%	97.83	97.83%

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2024	Satuan	Realisasi s.d TW III 2024	Capaian (%)
		Persentase Pemenuhan grand desain penguatan laboratorium pengujian Obat dan Makanan	40	%	37.50	93.75%
		Persentase Pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap standar Kemampuan Pengujian	87.96	%	88.55	100.67%
		Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	60	%	-	Akhir Tahun
		Persentase sampel Obat yang ditindaklanjuti tepat waktu	98	%	99.67	101.70%
		Persentase Status Akreditasi	100	%	100.00	100.00%
1.19	Penyidikan tindak pidana di bidang obat dan makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan yang optimal	3	%	3.00	100.00%
		Indeks profesionalitas ASN Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	86	%	-	Akhir Tahun
		Indeks RB Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	68.8	%	-	Akhir Tahun
		Persentase barang bukti yang selesai ditangani sesuai standar	70	%	96.33	137.61%
		Persentase Keberhasilan Penyidikan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	58	%	60.00	103.45%
		Persentase pemenuhan nilai kinerja penyidikan oleh UPT BPOM	92	%	75.34	81.89%
		Persentase pendalaman informasi penyidikan yang berhasil menjadi Laporan Kejadian	70	Indeks	54.17	77.39%
		Persentase perkara yang meningkat tahapan penyelesaiannya dengan adanya dukungan teknis	55	Indeks	53.33	96.96%
		Persentase rekomendasi hasil koordinasi lintas sektor di bidang penyidikan yang ditindaklanjuti	90	Indeks	71.43	79.37%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	92	%	90.00	97.83%

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2024	Satuan	Realisasi s.d TW III 2024	Capaian (%)
1.20	Analisis Kebijakan di bidang Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan internal terhadap Layanan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	4	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang optimal	3	Indeks	3.00	100.00%
		Indeks Profesionalitas ASN Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	92	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks RB Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	92.2	Indeks	-	Akhir Tahun
		Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	82.76	Nilai	-	Akhir Tahun
		Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	89.65	Nilai	-	Akhir Tahun
		Nilai kualitas diseminasi hasil analisis kebijakan	78.8	Nilai	-	Akhir Tahun
		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	70	Nilai	-	Akhir Tahun
		Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	86	Nilai	-	Akhir Tahun
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	94.9	Nilai	-	Akhir Tahun
		Persentase Analisis dan Rekomendasi Kebijakan pengawasan obat dan makanan yang dimanfaatkan	84.5	%	-	Akhir Tahun
		Persentase analisis kebijakan yang sesuai dengan perencanaan	100	%	100.00	100.00%
		Persentase kesesuaian penyelenggaraan analisis kebijakan dengan pedoman analisis kebijakan	98	%	85.71	87.46%
		Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	60	%	-	Akhir Tahun
		Tingkat Keberhasilan Koordinasi Dalam Layanan Dukungan Strategis Pimpinan	89	%	89.68	100.76%
1.21	Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	93.75	Indeks	-	Akhir Tahun

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2024	Satuan	Realisasi s.d TW III 2024	Capaian (%)
		Indeks pelayanan publik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha OT, Kos dan SK	4.7	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang optimal	3	Indeks	3.00	100.00%
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	91.44	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks RB Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos	89.2	Indeks	-	Akhir Tahun
		Jumlah kader/penyuluh yang memiliki kemampuan lanjutan terhadap keamanan, manfaat, dan mutu OT, SK, dan Kos	294	Kader/fasilitator	271.00	92.18%
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	95	Nilai	-	Akhir Tahun
		Persentase fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OT dan Kosmetik yang sesuai standar	100	%	63.31	63.31%
		Persentase kader/penyuluh yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu OT, SK dan Kos	97.11	%	75.51	77.76%
		Persentase lintas sektor yang berkomitmen dalam pemberdayaan masyarakat terhadap penerapan keamanan OT,SK dan Kos	85	%	50.00	58.82%
		Persentase lintas sektor yang berkomitmen dalam pendampingan UMKM OT dan Kos	87.5	%	81.82	93.51%
		Persentase lintas sektor yang bersinergi dalam rangka pendampingan UMKM OT Kos dan Pemberdayaan masyarakat di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	91.67	%	60.00	65.45%

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2024	Satuan	Realisasi s.d TW III 2024	Capaian (%)
		Tingkat efektivitas KIE OT, Kos, dan SK	99.2	%	99.23	100.03%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos	99	%	69.66	70.36%
1.22	Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber	Persentase Rekomendasi Analisis Siber di bidang Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	85	%	88.93	104.62%
		Persentase Hasil Patroli Siber yang ditindaklanjuti	80	%	81.29	101.61%
		Persentase Profil Pelanggaran/Kejahatan Siber Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	85	%	89.96	105.84%
		Persentase Hasil Analisis Digital Forensik yang dimanfaatkan	90	%	95.53	106.14%
		Indeks Reformasi Birokrasi Direktorat Siber Obat dan Makanan	78.4	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Direktorat Siber Obat dan Makanan	86.9	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Siber Obat dan Makanan yang Optimal	2.5	Indeks	3.00	120.00%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Siber Obat dan Makanan	90	%	95.00	105.56%
B.	Program Dukungan Manajemen					
		Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama	36	Nilai	-	Akhir Tahun
		Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	WTP	WTP	-	Akhir Tahun
		Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama	62.25	Nilai	-	Akhir Tahun
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	96	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks Kepuasan Media	77.13	Indeks	-	Akhir Tahun

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2024	Satuan	Realisasi s.d TW III 2024	Capaian (%)
		Indeks Opini Publik BPOM	81.00	Indeks	-	Akhir Tahun
		Persentase kerjasama yang efektif	90	%	72.83	80.92%
		Indeks Pemenuhan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPOM	4.00	Indeks	4.21	105.25%
2.1	Peningkatan penyelenggaraan Kerjasama dan Hubungan Masyarakat BPOM	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama dan Humas	3.89	Indeks	3.88	99.74%
		Indeks kepuasan media	77.13	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks opini publik BPOM	85.1	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Biro Kerja Sama dan Humas	3	Indeks	2.50	83.33%
		Indeks Profesionalitas ASN Biro Kerja Sama dan Humas	85.2	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks RB Biro Kerja Sama dan Humas	86.32	Indeks	-	Akhir Tahun
		Jumlah negara yang mendapatkan dukungan penguatan di bidang Obat dan Makanan dalam skema Kerja Sama Selatan-selatan	2	Negara	1.00	50.00%
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	96.41	Nilai	-	Akhir Tahun
		Persentase dokumen kerja sama yang diselesaikan tepat waktu	88	%	80.58	91.57%
		Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	%	70.48	78.31%
		Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	99.86	%	99.95	100.09%
		Persentase peran Badan POM dalam forum Bilateral, Regional dan Multilateral	90	%	75.17	83.52%
		Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti	80	%	75.86	94.83%

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2024	Satuan	Realisasi s.d TW III 2024	Capaian (%)
		Persentase publikasi kinerja BPOM sesuai agenda setting	98.6	%	100.00	101.42%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Kerja Sama dan Humas	100	%	100.00	100.00%
2.2	Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan	3.85	Indeks	3.59	93.25%
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Biro Perencanaan dan Keuangan yang baik	3	Indeks	2.50	83.33%
		Indeks Profesionalitas ASN Biro Perencanaan dan Keuangan	88.7	Indeks	-	Akhir Tahun
		Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM	62.25	Nilai	-	Akhir Tahun
		Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) BPOM	93.23	Nilai	-	Akhir Tahun
		Nilai Indeks RB Biro Perencanaan dan Keuangan	91.9	Nilai	-	Akhir Tahun
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPOM	96.15	Nilai	-	Akhir Tahun
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	97.5	Nilai	-	Akhir Tahun
		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan BPOM yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar.	100	%	69.10	69.10%
		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan SETTAMA yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar.	100	%	61.11	61.11%

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2024	Satuan	Realisasi s.d TW III 2024	Capaian (%)
		Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran, movev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan satker terhadap pedoman	92	%	83.58	90.85%
		Persentase kesesuaian Laporan Keuangan BPOM yang disusun sesuai SAP	100	%	75.00	75.00%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan	100	%	100.00	100.00%
2.3	Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan tata laksana	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap Layanan Biro Hukum dan Organisasi	3.85	Indeks	4.00	103.90%
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan dan Informasi	95.5	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks Pelayanan Publik	4.95	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Biro Hukum dan Organisasi yang optimal	3	Indeks	3.00	100.00%
		Indeks Profesionalitas ASN Biro Hukum dan Organisasi	87.71	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks RB Biro Hukum dan Organisasi	94.04	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks Reformasi Hukum	96.4	Indeks	-	Akhir Tahun
		Nilai Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha	3	Nilai	-	Akhir Tahun
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	96.55	Nilai	-	Akhir Tahun
		Nilai Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BPOM	4	Nilai	4.21	105.28%
		Persentase advokasi hukum yang ditindaklanjuti	100	%	100.00	100.00%
		Persentase Layanan Pengaduan dan Informasi yang selesai ditindaklanjuti	99.69	%	99.62	99.93%
		Persentase Peraturan Perundang-undangan yang disusun	100	%	100.00	100.00%

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2024	Satuan	Realisasi s.d TW III 2024	Capaian (%)
		Persentase rekomendasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang ditindaklanjuti	98	%	-	Akhir Tahun
		Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	100	%	-	Akhir Tahun
		Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	100	%	-	Akhir Tahun
		Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan yang dilaksanakan	97	%	97.03	100.03%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Hukum dan Organisas	96	%	100.00	104.17%
2.4	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Indeks Kepuasan Internal BPOM Terhadap Layanan Biro SDM	3.5	Indeks	3.57	102.00%
		Indeks Kesejahteraan Pegawai	3.2	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Biro SDM yang Optimal	3	Indeks	2.50	83.33%
		Indeks Profesionalitas ASN Biro SDM	89.12	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks RB Biro SDM	92.28	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks Sistem Merit	0.95	Indeks	0.97	102.11%
		Nilai Pengelolaan Kearsipan		%	-	Akhir Tahun
		Persentase ASN BPOM Yang Ditingkatkan Kariernya Sesuai Pedoman Pola Karir	80	%	-	Akhir Tahun
		Persentase ASN BPOM yang Memiliki Kinerja Berkriteria Minimal Baik	98	%	99.79	101.83%
		Persentase Layanan Kepegawaian Berbasis Digital yang Diimplementasikan Sesuai Perencanaan	94	%	-	Akhir Tahun
		Persentase Unit Kerja yang sudah memiliki perencanaan kebutuhan ASN yang Baik	80	%	-	Akhir Tahun
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro SDM	100	%	95.00	95.00%

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2024	Satuan	Realisasi s.d TW III 2024	Capaian (%)
2.5	Pengembangan SDM Aparatur Badan POM	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	77	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks Pelayanan Publik	3.35	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di PPSDM POM yang optimal	3	Indeks	3.00	100.00%
		Indeks Profesionalitas ASN PPSDM POM	88.64	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks Reformasi Birokrasi Badan POM Core Values BerAKHLAK	67.14	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks Reformasi Birokrasi PPSDM POM	91.7	Indeks	-	Akhir Tahun
		Jumlah SDM POM yang tersertifikasi sesuai Standar	1000	SDM	912.00	91.20%
		Nilai AKIP PPSDM POM	80.5	Nilai	-	Akhir Tahun
		Nilai Kepuasan Layanan Pembinaan PFM	4.5	Nilai	4.66	103.56%
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi	4.65	Nilai	4.72	101.51%
		Nilai Kinerja Anggaran PPSDM POM	91.83	Nilai	-	Akhir Tahun
		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	70	Nilai	-	Akhir Tahun
		Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	88	Nilai	-	Akhir Tahun
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	97.5	Nilai	-	Akhir Tahun
		Persentase kerja sama Pengembangan Kompetensi yang ditindaklanjuti	100	%	88.23	88.23%
		Persentase Layanan Pembinaan PFM yang dilaksanakan tepat waktu	98.95	%	100.00	101.06%
		Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	60	%	-	Akhir Tahun
		Persentase Realisasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Core Values BerAKHLAK	100	%	71.00	71.00%

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2024	Satuan	Realisasi s.d TW III 2024	Capaian (%)
		Persentase SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM	65.5	%	39.80	60.76%
		Persentase SDM BPOM yang memenuhi Standar Kompetensi	83	%	83.44	100.53%
		Persentase SDM Pengawas Obat dan Makanan yang meningkat pengetahuannya setelah mendapatkan Pengembangan Kompetensi	95	%	-	Akhir Tahun
2.6	Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan	Indeks CSIRT (Computer Security Incident Response Team)	4.6	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks Kepuasan Layanan TIK	3.5	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal	3	Indeks	3.00	100.00%
		Indeks Profesionalitas ASN Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	89.63	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks RB Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	86.1	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks SPBE Badan POM	4.1	Indeks	-	Akhir Tahun
		Jumlah Data Berbagi Pakai	30	Data	26.00	86.67%
		Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	84	Nilai	-	Akhir Tahun
		Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	90.25	Nilai	-	Akhir Tahun
		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	81	Nilai	-	Akhir Tahun
		Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	87	Nilai	-	Akhir Tahun
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	94.5	Nilai	-	Akhir Tahun
		Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir	100	%	81.48	81.48%

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2024	Satuan	Realisasi s.d TW III 2024	Capaian (%)
		Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu	98.5	%	99.15	100.66%
		Persentase Pemenuhan Bussines Continuity Management	75	%	73.10	97.47%
		Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan Roadmap TIK	100	%	65.60	65.60%
		Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, Data dan Keamanan	100	%	95.00	95.00%
		Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	69.22	%	-	Akhir Tahun
		Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan Real Time	100	%	98.23	98.23%
		Sertifikasi ISO 27001	1	Sertifikat	-	Akhir Tahun
2.7	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	86.3	Nilai	-	Akhir Tahun
		Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Mitra Kerja Inspektorat I	86	Nilai	-	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat I yang optimal	3	Level	3.00	100.00%
		Indeks profesionalitas ASN Inspektorat I	91.25	%	85.96	94.20%
		Indeks reformasi birokrasi Inspektorat I	86.7	%	-	Akhir Tahun
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	20.75	Indeks	-	Akhir Tahun
		Nilai evaluasi Kapabilitas APIP	3.6	Indeks	-	Akhir Tahun
		Nilai Evaluasi SPIP-T BPOM	3.85	%	-	Akhir Tahun
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	97.5	%	-	Akhir Tahun
		Nilai Survei Penilaian Integritas	83.48	%	-	Akhir Tahun

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2024	Satuan	Realisasi s.d TW III 2024	Capaian (%)
		Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan Terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	99.01	%	-	Akhir Tahun
		Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat I yang sesuai standar mutu	100	%	100.00	100.00%
		Persentase pengaduan mitra kerja Inspektorat I yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100	%	84.62	84.62%
		Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu	97.57	%	100.00	102.49%
		Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Ditindaklanjuti BPOM	94	%	94.65	100.69%
		Persentase rekomendasi pengawasan intern Inspektorat I yang ditindaklanjuti	96	Indeks	96.52	100.54%
		Persentase Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	30	Indeks	-	Akhir Tahun
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat I	92	Indeks	75.00	81.52%
2.8	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	86.3	Nilai	-	Akhir Tahun
		Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Mitra Kerja Inspektorat II	86	Nilai	-	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat II yang optimal	3	Level	3.00	100.00%
		Indeks profesionalitas ASN Inspektorat II	94.84	%	86.31	91.01%
		Indeks reformasi birokrasi Inspektorat II	86.7	Indeks	-	Akhir Tahun
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	20.75	Indeks	-	Akhir Tahun
		Nilai evaluasi Kapabilitas APIP	3.6	%	-	Akhir Tahun

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2024	Satuan	Realisasi s.d TW III 2024	Capaian (%)
		Nilai Evaluasi SPIP-T BPOM	3.85	%	-	Akhir Tahun
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	95.79	%	-	Akhir Tahun
		Nilai Survei Penilaian Integritas	83.48	%	-	Akhir Tahun
		Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan Terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	99.01	%	-	Akhir Tahun
		Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat II yang sesuai standar mutu	100	%	100.00	100.00%
		Persentase pengaduan mitra kerja Inspektorat II yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100	Indeks	77.78	77.78%
		Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu	97.57	Indeks	100.00	102.49%
		Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Ditindaklanjuti BPOM	94	%	94.65	100.69%
		Persentase rekomendasi pengawasan intern Inspektorat II yang ditindaklanjuti	96	Indeks	97.14	101.19%
		Persentase Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	30	%	-	Akhir Tahun
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat II	92	%	75.00	81.52%
2.9	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap Layanan Biro Umum	3.81	Nilai	3.60	94.49%
		Indeks Pemanfaatan Sistem Pengadaan Barang/Jasa oleh Satker	90	Nilai	-	Akhir Tahun
		Indeks Pengelolaan Aset BPOM	3.42	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Biro Umum yang optimal	3	Indeks	3.00	100.00%
		Indeks profesionalitas ASN Biro Umum	85.9	Persen	-	Akhir Tahun

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2024	Satuan	Realisasi s.d TW III 2024	Capaian (%)
		Indeks RB Biro Umum	90.48	Persen	-	Akhir Tahun
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa BPOM	85	Persen	-	Akhir Tahun
		Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	94	Level	-	Akhir Tahun
		Persentase keberhasilan koordinasi dalam layanan keprotokolan dan kesekretariatan pimpinan	92.5	Persen	92.53	100.03%
		Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Sesuai Perencanaan	100	Indeks	88.89	88.89%
		Persentase Satker yang mampu Mengelola BMN dengan Baik	95	Indeks	77.00	81.05%
		Persentase Unit Kerja yang Mampu Mengelola Arsip dengan Baik Sesuai Standar Pengelolaan Kearsipan	100	Indeks	100.00	100.00%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Umum	100	%	92.00	92.00%



LAMPIRAN II

PERINGKAT REALISASI ANGGARAN UNIT PUSAT

No	Unit Kerja	Pagu	Pagu Setelah AA	Realisasi	%Realisasi Terhadap Pagu Awal	% Realisasi Terhadap Pagu Automatic Adjustment
1	DIT. STANDADISASI OBAT TRADISIONAL. SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK	7.181.790.000	6.889.749.000	5.770.241.215	80,35%	83,75%
2	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	245.752.303.000	245.219.704.000	203.539.305.918	82,82%	83,00%
3	DIT. REGISTRASI PANGAN OLAHAN	8.892.210.000	8.592.210.000	6.990.147.044	78,61%	81,35%
4	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	69.101.863.000	66.334.758.000	52.409.881.780	75,84%	79,01%
5	PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN OBAT DAN MAKANAN	18.738.978.000	17.816.155.000	14.064.575.308	75,06%	78,94%
6	DIT. SIBER OBAT DAN MAKANAN	9.740.929.000	9.200.682.000	7.179.734.311	73,71%	78,03%
7	DIT. STANDARDISASI OBAT. NARKOTIKA. PSIKOTROPIKA. PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF	8.691.988.000	8.296.954.000	6.388.462.644	73,50%	77,00%
8	DIT. PENGAWASAN KOSMETIK	10.467.862.000	10.089.577.000	7.676.745.520	73,34%	76,09%
9	DIT. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA OBAT TRADISIONAL. SUPLEMEN KESEHATAN. DAN KOSMETIK	12.180.347.000	11.556.693.000	8.789.139.066	72,16%	76,05%
10	DIT. CEGAH TANGKAL	9.629.642.000	9.175.637.000	6.887.723.107	71,53%	75,07%
11	PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN	49.458.463.000	47.212.254.000	35.134.083.833	71,04%	74,42%
12	INSPEKTORAT I	19.857.121.000	19.274.329.000	14.176.402.262	71,39%	73,55%
13	DIT. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA PANGAN OLAHAN	17.440.050.000	16.690.211.000	12.227.038.234	70,11%	73,26%
14	DIT. PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN	9.515.134.000	8.954.901.000	6.544.073.079	68,78%	73,08%
15	DIT. PENGAWASAN KEAMANAN. MUTU DAN EKSPOR IMPOR OBAT. NARKOTIKA. PSIKOTROPIKA. PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF	14.943.811.000	14.229.163.000	10.324.667.076	69,09%	72,56%

No	Unit Kerja	Pagu	Pagu Setelah AA	Realisasi	%Realisasi Terhadap Pagu Awal	% Realisasi Terhadap Pagu Automatic Adjustment
16	DIT. REGISTRASI OBAT TRADISIONAL. SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK	11.391.066.000	10.968.241.000	7.857.440.415	68,98%	71,64%
17	DIT. PENGAWASAN PRODUKSI OBAT. NARKOTIKA. PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR	11.356.263.000	10.917.185.000	7.729.953.511	68,07%	70,81%
18	BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN	21.700.262.000	20.781.658.000	14.370.032.821	66,22%	69,15%
19	DIT. REGISTRASI OBAT	11.581.444.000	11.247.698.000	7.773.845.970	67,12%	69,11%
20	DIT. PENGAWASAN DISTRIBUSI DAN PELAYANAN OBAT. NARKOTIKA. PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR	7.892.275.000	7.621.134.000	5.225.300.523	66,21%	68,56%
21	DIT. INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN	9.183.493.000	9.183.493.000	6.236.371.319	67,91%	67,91%
22	INSPEKTORAT II	7.836.110.000	7.419.109.000	5.026.695.968	64,15%	67,75%
23	PUSAT PENGEMBANGAN SDM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	51.720.013.000	49.405.141.000	33.458.839.187	64,69%	67,72%
24	DIT. PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN	12.380.018.000	12.228.651.000	8.267.725.756	66,78%	67,61%
25	DIT. STANDRDISASI PANGAN OLAHAN	8.130.472.000	7.859.942.000	5.286.904.156	65,03%	67,26%
26	BIRO UMUM	123.305.388.000	113.051.515.000	75.515.926.578	61,24%	66,80%
27	BIRO KERJASAMA	16.208.512.000	15.222.303.000	9.888.274.117	61,01%	64,96%
28	BIRO HUKUM DAN ORGANISASI	14.959.391.000	14.289.702.000	9.194.871.414	61,47%	64,35%
29	DIT. PENGAWASAN PEREDARAN PANGAN OLAHAN	16.062.893.000	15.352.673.000	9.825.509.424	61,17%	64,00%
30	DIT. PENGAWASAN PRODUKSI PANGAN OLAHAN	16.437.254.000	15.624.094.000	9.986.605.567	60,76%	63,92%

PERINGKAT REALISASI ANGGARAN BALAI BESAR/BALAI POM

NO	Unit Kerja	Pagu	Pagu Setelah AA	Realisasi	% Realisasi Terhadap Pagu Awal	% Realisasi Terhadap Pagu Automatic Adjustment
1	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DENPASAR	42.007.580.000	39.737.656.000	33.059.356.509	78,70%	83,19%
2	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MATARAM	28.033.787.000	25.636.554.000	20.935.359.720	74,68%	81,66%
3	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PEKAN BARU	46.364.718.000	43.783.669.000	35.752.889.555	77,11%	81,66%
4	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BENGKULU	29.490.984.000	28.827.574.000	23.497.504.049	79,68%	81,51%
5	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SOFIFI	35.895.261.000	17.766.781.000	14.285.891.575	39,80%	80,41%
6	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SERANG	31.174.170.000	30.629.804.000	24.379.990.616	78,21%	79,60%
7	BALAI POM DI TANGERANG	10.898.335.000	10.788.472.000	8.412.770.789	77,19%	77,98%
8	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAMBI	34.886.550.000	32.408.713.000	25.228.931.668	72,32%	77,85%
9	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	65.463.183.000	62.761.150.000	48.593.286.857	74,23%	77,43%
10	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MEDAN	50.995.008.000	49.903.755.000	38.392.764.928	75,29%	76,93%
11	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALEMBANG	34.549.827.000	34.549.827.000	26.280.050.631	76,06%	76,06%
12	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANJARMASIN	29.003.431.000	28.029.011.000	21.268.805.616	73,33%	75,88%
13	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MAMUJU	26.085.521.000	22.308.795.000	16.797.291.246	64,39%	75,29%
14	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN YOGYAKARTA	39.715.969.000	36.202.190.000	27.258.039.474	68,63%	75,29%
15	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH	29.029.899.000	27.515.396.000	20.713.672.733	71,35%	75,28%

NO	Unit Kerja	Pagu	Pagu Setelah AA	Realisasi	% Realisasi Terhadap Pagu Awal	% Realisasi Terhadap Pagu Automatic Adjustment
16	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PADANG	44.028.712.000	43.083.479.000	32.181.909.501	73,09%	74,70%
17	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALANGKARAYA	24.933.735.000	24.277.952.000	18.100.526.977	72,59%	74,56%
18	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MANADO	36.123.134.000	35.709.961.000	26.594.793.901	73,62%	74,47%
19	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SEMARANG	64.194.354.000	61.539.981.000	45.710.997.306	71,21%	74,28%
20	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALU	25.696.633.000	25.086.793.000	18.504.564.245	72,01%	73,76%
21	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM	26.462.674.000	25.780.863.000	18.942.040.474	71,58%	73,47%
22	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI GORONTALO	19.931.864.000	18.233.876.000	13.393.455.554	67,20%	73,45%
23	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDAR LAMPUNG	33.032.442.000	30.347.303.000	22.274.357.222	67,43%	73,40%
24	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KENDARI	26.863.219.000	26.739.289.000	19.596.587.813	72,95%	73,29%
25	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAKARTA	50.625.276.000	49.317.791.000	36.007.448.993	71,13%	73,01%
26	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN	15.338.031.000	13.686.564.000	9.904.019.937	64,57%	72,36%
27	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SAMARINDA	32.780.358.000	31.885.142.000	21.808.212.195	66,53%	68,40%
28	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAYAPURA	30.706.163.000	27.470.110.000	18.750.806.018	61,07%	68,26%
29	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KUPANG	35.054.386.000	34.999.478.000	23.835.260.215	68,00%	68,10%
30	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PONTIANAK	31.317.482.000	29.840.643.000	19.874.828.733	63,46%	66,60%
31	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SURABAYA	71.756.636.000	70.708.940.000	47.002.616.732	65,50%	66,47%
32	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MANOKWARI	28.080.315.000	24.804.027.000	16.443.424.807	58,56%	66,29%

NO	Unit Kerja	Pagu	Pagu Setelah AA	Realisasi	% Realisasi Terhadap Pagu Awal	% Realisasi Terhadap Pagu Automatic Adjustment
33	BALAI POM DI BOGOR	12.524.251.000	12.464.301.000	8.256.884.220	65,93%	66,24%
34	BALAI POM DI SURAKARTA	10.839.975.000	10.728.595.000	6.983.723.353	64,43%	65,09%
35	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MAKASSAR	49.286.656.000	47.561.513.000	29.808.215.652	60,48%	62,67%
36	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG	22.178.919.000	20.960.563.000	12.932.629.722	58,31%	61,70%
37	BALAI POM DI KEDIRI	11.496.280.000	11.344.168.000	6.988.908.558	60,79%	61,61%
38	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN AMBON	30.912.619.000	30.392.526.000	17.790.820.637	57,55%	58,54%
39	BALAI POM DI JEMBER	9.451.298.000	9.276.988.000	5.273.442.394	55,80%	56,84%
40	BALAI POM DI PALOPO	11.170.364.000	10.979.832.000	6.019.587.087	53,89%	54,82%
41	BALAI POM DI TASIKMALAYA	11.148.401.000	10.977.478.000	5.950.171.853	53,37%	54,20%
42	BALAI POM DI PAYAKUMBUH	21.196.443.000	20.996.251.000	7.509.341.878	35,43%	35,77%

PERINGKAT REALISASI ANGGARAN LOKA POM

NO	Unit Kerja	Pagu	Pagu Setelah AA	Realisasi	% Realisasi Terhadap Pagu Awal	% Realisasi Terhadap Pagu Automatic Adjustment
1	LOKA POM DI KABUPATEN TANAH BUMBU	13.045.089.000	4.464.088.000	3.725.179.310	28,56%	83,45%
2	LOKA POM DI ACEH TENGAH	5.008.156.000	4.905.313.000	4.011.906.646	80,11%	81,79%
3	LOKA POM DI KOTA SUNGAI PENUH	4.290.101.000	4.181.417.000	3.374.747.191	78,66%	80,71%
4	LOKA POM DI KABUPATEN SANGGAU	4.364.947.000	4.225.444.000	3.384.609.024	77,54%	80,10%
5	LOKA POM DI KABUPATEN BELITUNG	4.767.631.000	4.283.622.000	3.370.444.015	70,69%	78,68%
6	LOKA POM DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	4.541.627.000	4.438.465.000	3.447.388.784	75,91%	77,67%
7	LOKA POM DI KABUPATEN TULANGBAWANG	4.713.791.000	4.220.718.000	3.272.551.575	69,43%	77,54%
8	LOKA POM DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU	5.859.839.000	5.351.680.000	4.146.768.301	70,77%	77,49%
9	LOKA POM DI KOTA LUBUKLINGGAU	4.497.759.000	4.401.155.000	3.402.659.745	75,65%	77,31%
10	LOKA POM DI KABUPATEN ENDE	8.306.955.000	7.874.909.000	6.073.300.395	73,11%	77,12%
11	LOKA POM DI KABUPATEN MIMIKA	5.288.116.000	5.149.356.000	3.965.943.973	75,00%	77,02%
12	LOKA POM DI KABUPATEN MERAUKE	4.954.806.000	4.865.643.000	3.719.814.640	75,07%	76,45%
13	LOKA POM DI KABUPATEN BIMA	4.931.885.000	4.795.033.000	3.655.139.000	74,11%	76,23%
14	LOKA POM DI KABUPATEN DHARMASRAYA	3.708.723.000	3.622.575.000	2.748.547.859	74,11%	75,87%
15	LOKA POM DI ACEH SELATAN	4.384.266.000	4.273.981.000	3.241.930.810	73,94%	75,85%
16	LOKA POM DI KOTA BALIKPAPAN	6.135.345.000	5.020.189.000	3.742.830.429	61,00%	74,56%
17	LOKA POM DI KOTA TANJUNGBALAI	4.424.763.000	4.340.434.000	3.218.362.439	72,74%	74,15%
18	LOKA POM DI KOTA BAUBAU	6.921.404.000	6.789.043.000	5.023.627.908	72,58%	74,00%
19	LOKA POM DI KABUPATEN PULAU MOROTAI	4.157.261.000	4.065.203.000	2.996.523.444	72,08%	73,71%
20	LOKA POM DI KABUPATEN BULELENG	15.985.780.000	5.089.943.000	3.749.921.392	23,46%	73,67%

NO	Unit Kerja	Pagu	Pagu Setelah AA	Realisasi	% Realisasi Terhadap Pagu Awal	% Realisasi Terhadap Pagu Automatic Adjustment
21	LOKA POM DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR	4.266.999.000	4.172.922.000	3.070.076.366	71,95%	73,57%
22	LOKA POM DI KABUPATEN REJANG LEBONG	5.431.800.000	5.385.404.000	3.908.882.080	71,96%	72,58%
23	LOKA POM DI KOTA TANJUNGPINANG	4.377.085.000	4.244.322.000	3.017.774.376	68,94%	71,10%
24	LOKA POM DI KABUPATEN BANGGAI	4.195.387.000	4.113.916.000	2.905.290.857	69,25%	70,62%
25	LOKA POM DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	5.226.746.000	5.133.614.000	3.598.472.480	68,85%	70,10%
26	LOKA POM DI KOTA DUMAI	6.791.731.000	5.935.898.000	4.105.404.853	60,45%	69,16%
27	LOKA POM DI KABUPATEN BANYUMAS	6.853.812.000	6.781.893.000	4.688.617.860	68,41%	69,13%
28	LOKA POM DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	5.498.777.000	5.378.295.000	3.593.283.752	65,35%	66,81%
29	LOKA POM DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT	5.451.264.000	5.338.322.000	3.527.262.709	64,71%	66,07%
30	LOKA POM DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR	5.986.794.000	5.910.735.000	3.696.794.230	61,75%	62,54%
31	LOKA POM DI KABUPATEN SORONG	7.491.119.000	7.141.876.000	4.339.634.941	57,93%	60,76%



Jln. Percetakan Negara Jakarta Pusat
10560



021 4244691



www.pom.go.id



halobpom@pom.go.id



[@bpom_ri](https://twitter.com/bpom_ri)



[Bpom.RI](https://www.facebook.com/Bpom.RI)